

PROPOSAL

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
RUMAH TANGGA DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

TAMRIN

Nomor stambuk : 10564 01406 11



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA RUMAH TANGGA DI WILAYAH PESISIR
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

TAMRIN

Nomor Stambuk : 10564 01406 11

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan
Usaha Rumah Tangga Di Wilayah Pesisir
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Nama Mahasiswa : Tamrin

Nomor Stambuk : 10564 01406 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

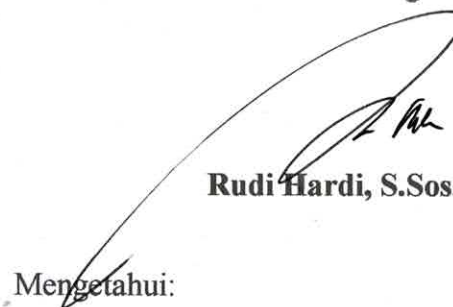
Menyetujui:

Pembimbing I



Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM

Pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos., M.Si.

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah Di Terima Oleh TIM Penelii Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, NOMOR : 1219/FSP/A.I-VIII/VIII?39/2018, Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S. 1) Dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Hari Kamis Tanggal 11, Agustus 2018

TIM PENILAI

Ketua

Dr. Hj. Ihyani Malik,,S.Sos,,M.Si

Sekretaris

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Jaelan Uaman, M.Si
2. Drs. Hj. Nurmaeta, MM
3. Dr. Andi Rosdiantio Razak, M.Si
4. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tamrin
Nomor Stambuk : 10564 01406 11
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 26 April 2018

Yang Menyatakan,


Tamrin

ABSTRAK

TAMRIN, 2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Rumah Tangga Di Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dibimbing oleh Hj. St. Nuemaeta dan Rudi Hardi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha rumah tangga di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ada dalam pemberdayaan usaha rumah tangga di wilayah pesisir kabupaten pangkajene dan kepulauan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 (Delapan) orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perikanan (DP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya yang ada di bidang perikanan dalam hal ini telah menjalankan perannya sebagai *stabilator* meliputi (a). Penciptaan kondisi usaha yang kondusif berupa jaminan perizinan yang dipermudah dan tidak ada tuntutan bayar pajak bagi para pelaku usaha rumah tangga. (b) Bantuan permodalan berupa barang yang dibutuhkan para pelaku usaha seperti alat pres dan sebagainya. Peran pemerintah berikutnya sebagai *dinamisor*, dalam konsep pemberdayaan usaha rumah tangga meliputi (a) Pengembangan kemitraan yaitu berupa kemitraan dengan rumah makan, hotel, dan toko/swalayan untuk nantinya membantu dalam hal pemasaran hasil produksi para pelaku usaha rumah tangga (b) Pelatihan di lakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali, seperti pelatihan manajemen usaha, dan pelatihan teknis.. Kemudian, Faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari masyarakat serta Sumberdaya alam yang senantiasa menyiapkan bahan baku usaha. Faktor penghambat kondisi iklim tidak menentu serta pemasaran produk yang masih terbatas.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Pemberdayaan, Pesisir, Usaha Rumah Tangga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, penulis panjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Rumah Tangga Di Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya doa dan bantuan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada kedua orangtuaku tercinta Sahide dan Rabaiya, yang tak henti-henti memberikan doa, bimbingannya, dan kasih sayang yang tulus, serta jasa dan pengorbanannya sepanjang masa sehingga skripsi ini bisa terselesaikan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi. Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang dan selalu dalam lindungan-Nya. Terima kasih yang tulus dan mendalam khususnya kepada saudara (i) kandungku tercinta, serta seluruh keluarga besarku dan teman-temanku semuanya yang senantiasa memberikan bantuan berupa moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, kepada yang terhormat :

1. Ibu/Bapak. Dra Hj. St. Nurmaeta, MM selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.SI selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan baik.
5. Terima kasih yang tulus dan mendalam khususnya kepada sahabat-sahabatku seperjuangan dalam tanah perantauan, yang senantiasa memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini dan meluangkan waktunya kepada penulis.
6. Segenap rekan-rekan Akademik di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

khususnya angkatan 2011, terutama kelas E yang telah memberikan masukan dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Dan semoga bantuan serta bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahuwata'ala. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, April 2018

Tamrin

DAFTAR ISI

Halaman Judul Pengesahan.....	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmia	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran Pemerintah Daerah	8
B. Konsep Pemerintah Daerah.....	9
C. Pengertian Wilayah Pesisir.....	14
D. Konsep Usaha Rumah Tangga	16
E. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.....	26
F. Kerangka Pikir.....	35
G. Fokus Penelitian	36
H. Deskriptif Fokus Penelitian.....	36
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Informan Penelitian.....	39

E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Keabsahan Data.....	42

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	44
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Rumah Tangga Di Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	55
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Rumah Tangga Di Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	74

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA	83
----------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kesejahteraan pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian (Dahuri, 2001).

Pemandangan yang sering kita jumpai di perkampungan nelayan adalah lingkungan hidup yang kumuh serta rumah-rumah yang sangat sederhana. Walaupun ada beberapa rumah yang menonjolkan tanda-tanda kemakmuran (misalnya rumah yang megah dan berantena parabola), rumah-rumah tersebut umumnya dipunyai oleh pemilik kapal, pemodal, atau rentenir yang jumlahnya tidak signifikan dan sumbangannya kepada kesejahteraan komunitas sangat tergantung pada individu yang bersangkutan.

Dalam kondisi yang secara multidimensi demikian miskin, akan sangat sulit bagi para nelayan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan begitu saja bersaing dalam pemanfaatan hasil laut di era keterbukaan sekarang ini. Mereka akan selalu kalah bersaing dengan perusahaan penangkapan ikan, baik asing maupun nasional, yang berperalatan modern. Oleh karena itu, pemberdayaan komunitas nelayan merupakan langkah yang sangat krusial dalam mencapai tujuan pemanfaatan kekayaan laut.

Kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Bagi masyarakat nelayan, diantara beberapa jenis kebutuhan pokok kehidupan, kebutuhan yang paling penting adalah pangan. Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pangan setiap hari sangat berperan besar untuk menjaga kelangsungan hidup mereka (Kusnadi, 2006)

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan ini. pengabaian terhadap faktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pangkajene dan kepulauan salah satu daerah pesisir dan memiliki gugusan pulau-pulau yang harus dikelola dengan dilalukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dalam pembakuan undang-undang No. 1 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dalam pasal 63 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya”.

Undang-undang diatas menegaskan bahwa pemerintah memang peranan penting dalam memantau secara berkala, kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah payau dan laut/pantai di tempat-tempat masyarakat melakukan aktivitas budaya,

dengan demikian pemerintah punya data dasar kualitas wilayah pesisir, untuk mengetahui arah pola perkembangannya

Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Wilayah pesisir wilayah yang penting apabila ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Seperti hasil penangkapan laut yang mencapai 7.944,3ton dan budidaya rumput laut 7.174 ton adapun jenis ikan di perairan Pangkep ialah peperek, gerot-gerot, kakap merah, kurapu lencam, cucut, pari, layan, selar, kuwe, tenggiri, belanak, teripang, teri hitam, cumi-cumi, udang, tuna. Dan lain-lain.

Transisi antara daratan dan lautan diwilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai yang sangat luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena tidak sepahaman pemamfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada diwilayah pesisir. Salah satu wilayah pesisir Indonesia di kecamatan Liukang Tangayya, kecamatan Liukang Kalmas dan kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep yang begitu luas dan berpotensi, dimana sebagian besarnya masyarakat menggantungkan proses kehidupannya dari hasil laut, pelaku usaha perikanan tangkap adalah nelayan kecil dengan menggunakan motor tempel yang daya jelajahnya sempit dan kemampuan tangkapannya relatif kecil di bandingkan biaya produksinya. Dampak yang di akibatkan adalah tidak seimbangny biaya produksi penangkapan ikan dengan nilai produksi yang di peroleh sehingga tingkat

kesejahteraan nelayan relatif tidak meningkat dari tahun ketahun. Produksi perikanan tangkap dari perairan pantai kabupaten Pangkep cenderung menunjukkan gejala over fishing yang di tunjukan dengan penurunan produksi ikan tangkapan. Selain itu, dengan keberadaan stok ikan yang semakin menipis memaksa nelayan untuk memperluas daerah penangkapannya melewati teritorial lain bahkan lintasan provinsi yang terkadang menimbulkan konflik kepentingan dengan nelayan setempat.

Pengelolaan kelautan dan perikanan saat ini sudah sangat berkembang dengan cepat, jika hal ini tidak diatur secara bijak akan menimbulkan masalah pengelolaan dimasa kini dan yang akan datang. Permasalahan yang di hadapi sektor kelautan dan perikanan saat ini adalah *Illegal Fishing* dan *Destruktive Fishing* permasalahan ini ditimbulkan karena masih rendahnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap sektor kelautan dan perikanan.

Jika permasalahan ini berlangsung secara terus menerus akan menyebkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Sampai saat ini industri pengelolaan ikan di wilayah pulau-pulau di Pangkep masih belum optimal, padahal jika di laksanakan secara optimal usaha perikanan ini dapat memberikan pendapatan dan kesejahteraan yang tinggi kepada para nelayan.

Faktor-faktor yang paling mendasar sebagai indikator dari kemiskinan nelayan seperti (Nikijuluw, 2002); (1) keterbatasan modal untuk megembangkan usaha. Selain itu, sumber pedapatan di dapat dari satu orang. Selain kurangnya informasi mengenai pengajuan kredit juga dikarenakan ketidak mampuan nelayan dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diajukan oleh pihak pemberi kredit, (2) Tingkat pendidikan rendah, Tingkat pendidikan sumberdaya manusia yang rendah

merupakan salah satu permasalahan yang juga dapat menyebabkan nilai tambah nelayan miskin. (3) Pendapatan yang rendah. Pendapatan nelayan produsen sebagai pelaku utama sudah selayaknya jika barang yang sulit didapat dan besar permintaan maka tinggi harganya. (4) Perilaku ekonomi rumah tangga nelayan, beberapa alasan yang menjadikan perilaku ekonomi nelayan yang buruk adalah budaya boros, dimana pendapatan hari ini dihabiskan pada hari yang sama pula, tidak ada kesadaran untuk memiliki tabungan, dan pola konsumsi yang cenderung tidak teratur. (5) Tidak ada alternatif, dengan segala bentuk keterbatasannya sehingga nelayan tidak mampu memiliki mata pencaharian lain, keterbatasan tersebut antara lain tidak memiliki keahlian lain selain menjadi nelayan, terbatasnya peluang kerja bagi mereka dan kemampuan melihat peluang kerja yang rendah, dan (6) Perencanaan secara regional yang tidak mendukung, dalam menetapkan kebijakannya pemerintah hampir tidak memperhatikan adanya perbedaan mendasar secara demografi dan geografi, sehingga kebijakannya tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik pada daerah-daerah tertentu.

Berkaitan dengan ini, tentunya kita menyadari bahwa pemerintah sangat berperan penting di dalam menangani masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat dengan diperlukannya program-program pemberdayaan masyarakat sebagai strategi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Rumah Tangga di Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan".

B. Rumusan Masalah

Menyadari begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang dilibatkan dalam penelitian ini. Maka dari itu masalah yang akan diteliti secara garis besarnya dirinci pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha rumah tangga di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan usaha rumah tangga di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha rumah tangga di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan usaha rumah tangga di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari segi teoritis :

Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi ilmu pemerintahan dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis:

Bagi pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diharapkan

penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memberdayakan usaha rumah tangga di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Daerah

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009). Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Dalam melakukan peranan, masyarakat biasanya memberi fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk melaksanakan peranan. Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari Struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan (Soekanto, 2009).

Menurut Mayor Polak (dalam Arif, 2012) yang berpendapat bahwa : “Peranan atau *role* adalah suatu kelakuan yang di harapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu”. Menurut istilah manajemen, peran adalah harapan tentang perilaku yang patut bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut fungsi dan tugas yang di laksanakan sehingga keberadaan organisasi atau lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan status berarti di katakan menjalankan suatu peranan.

B. Konsep Pemerintah Daerah

Kata "Pemerintah" dalam bahasa Inggris ialah "*government*" berasal dari kata *govern*, yaitu merupakan institusi/lembaga beserta jajarannya yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus Negara dan menjalankan kehendak rakyat. Kecenderungannya lebih tertuju kepada Eksekutif saja (Pemerintah dalam arti sempit) yaitu : sebagai organ Negara pelaksana tugas-tugas Eksekutif saja. Sedangkan Pemerintah dalam arti luas adalah seluruh lembaga/organ Negara yang menjalankan kewajiban Negara sebagai organisasi sosial (*societal*) yang sangat besar dan kompleks (Rewansayah, 2011).

Dalam arti luas, Pemerintahan merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh lembaga/badan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Auditif. Pemerintah dalam arti sempit, hanya merupakan aktivitas badan-badan Eksekutif saja, yang dipimpin oleh Presiden selaku kepala Pemerintahan. Pemerintah dalam arti luas merupakan seluruh aktivitas Pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh aparatur Negara yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Presiden selaku kepala Negara. Pemerintah

dalam arti luas meliputi seluruh aparatur Negara (termasuk lembaga Negara seperti : MPR, DPR, DPD, MA, MK DAN BPK) dan aparatur Pemerintah daerah, selanjutnya dalam buku ini penulis sebut Pemerintahan Negara (Rewansyah, 2011).

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja, 1998).

Jimmy (1991), pemerintah daerah (daerah otonom) merupakan suatu bagian, suatu wilayah hukum dari pada negara yang tidak mempunyai kekuasaan *power/authority* yang lain daripada yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat (negara), dan apabila daerah otonom itu keluar dari batas kewenangan yang telah diberikan melalui peraturan perundang-undangan maka daerah otonom itu dapat dikejar terus oleh pemerintah pusat (negara) sebagai kekuasaan lebih tinggi.

Kemudian diatur dalam pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai urusan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Dasar No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang di bantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagai mana yang di maksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 lahir sebagai pengganti Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, tuntunan penyelenggaraan otonomi daerah, sekaligus merupakan penjabaran dari konstitusi dan undang-undang yang diterbitkan sebelumnya sebagai peraturan pelaksanaan yang berkenaan dengan penguatan otonomi di daerah atau penataan kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang ada dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi serta pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pada bab IV pasal 9 terkait urusan pemerintahan di klasifikasikan menjadi 3 urusan pemerintahan.

1. Urusan pemerintahan absolut sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

2. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Peran pemerintah merupakan keperluan mutlak dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta dan merupakan salah satu fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam suatu organisasi menurut Sutarto Alam (2012) akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :Petugas atau satuan-satuan bertengkar membuat suatu bidang kerja atau wewenang yang masing-masing merasa bahwa suatu pekerjaan tidak termasuk dalam ruang lingkup kerjanya,

- a. Petugas atau satuan-satuan saling melempar suatu tanggung jawab kepada pihak lain karena masing-masing merasa bahwa suatu pekerjaan tidak termasuk dalam ruang lingkup kerjanya,
- b. Pencapaian tujuan organisasi serba kacau, petugas nampak serba ragu dan pelaksanaan pekerjaan serba salah, saling berbenturan sering dihapuskan oleh pekerjaan lain tanpa disadari.

Siagian 1984, peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama yaitu:

1. Selaku modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan

cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.

2. Selaku katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional, mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Selaku dinamisator, bahwa peran pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
4. Selaku stabilisator, bahwa peran pemerintah adalah stabilisator yang menjaga kestabilan nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.
5. Selaku pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Selain itu, menurut Rewansyah, 2011 bahwa fungsi pemerintah daerah terdiri dari 5 (lima) fungsi utama (*main function*) eksekutif (*Pemerintah*), yaitu ;

1. Fungsi pengaturan/regulasi.
2. Fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public service*).
3. Fungsi pemberdayaan masyarakat (*empowering people*).
4. Fungsi pengelolaan asset/kekayaan Negara.
5. Fungsi keamanan, pengamanan dan perlindungan.

C. Pengertian Wilayah Pesisir

1. Pengertian Wilayah Pesisir.

Menurut Dahuri, dkk (1996; 5-10) bahwa sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batas yang sejajar garis pantai (*longsshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*crossshore*).

Menurut Soegiarto (1976) dalam Dahuri, dkk, 1996) bahwa definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat. Selain itu, menurut kesepakatan Internasional (Beatley T., *et al* ,1994 dalam Dahuri, dkk, 1996) dikatakan bahwa wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat

mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*).

Kemudian, tipe penggunaan wilayah pesisir dalam pembangunan dapat dikelompokkan dalam dua macam penggunaan, yaitu:

Pertama, Penggunaan secara Intensif, yaitu tipe penggunaan wilayah pesisir yang keberadaannya telah digunakan secara intensif untuk tujuan tertentu, diantaranya meliputi daerah pemukiman, persawahan irigasi teknis, tambak intensif yang dikelola oleh pemerintah atau swasta, industri dan lain-lain.

Kedua, Penggunaan secara ekstensif, yaitu tipe penggunaan wilayah pesisir yang keberadaannya belum dimanfaatkan secara intensif, seperti Mangrove, padang lamun, pantai berpasir, dan lain-lain. Sehingga daerah ini merupakan daerah yang tersedia bagi pengembangan wilayah.

2. Penggolongan Masyarakat Wilayah Pesisir

Menurut Sallatang (2001) ditemukan bentuk dan sifat-sifat masyarakat pesisir, yaitu dibagi atas dua bagian:

Pertama, Masyarakat pesisir perkotaan mempunyai hubungan sosial yang bersifat sekunder (*gesellschaft*), yang meliputi dua tipe, yaitu:

- a. Tipe Masyarakat Pesisir Metropolitan, dengan ciri utamanya adalah bahwa masyarakat yang mendiami tipe ini telah mulai mengembangkan sektor perdagangan dan industri, tetapi masih sangat didominasi oleh kegiatan politik pemerintahan dengan sektor kepegawaian yang sangat besar, sehingga sangat tidak efisien dan tidak efektif

- b. Tipe Masyarakat Pesisir Kota, dengan ciri utama sebagai pusat pemerintahan dengan sektor perdagangan dan industri yang sudah mulai ada, tetapi masih sangat lemah. Kegiatan di dalamnya masih didominasi oleh kegiatan politik pemerintahan dengan sektor kepegawaian yang terlalu besar, tetapi sangat tidak efisien dan sangat tidak efektif.

Kedua, Masyarakat Pesisir Pedesaan, meliputi empat tipe, sebagai berikut:

- a. Tipe Bersahaja, dengan mata pencaharian antara lain meramu, berburu, dan menangkap ikan.
- b. Tipe Agromaritim Sederhana, dengan mata pencaharian meliputi bersosok tanam, menangkap ikan dengan teknologi sederhana.
- c. Tipe Agro Niaga Maritim, dengan mata pencaharian antara lain usaha tani ekstensif, tambak, niaga dan perdagangan.
- d. Tipe Agro Kompleks, dengan mata pencaharian yaitu, usaha tani tanaman pangan utamanya padi sawah yang amat intensif.

D. Konsep Usaha Rumah Tangga

Pengertian usaha adalah suatu unit ekonomi yang melakukan aktifitas dengan tujuan menghasilkan barang/jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, atau dengan kata lain secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan komersial.

Usaha rumah tangga atau usaha sampingan adalah usaha tambahan dari usaha pokok yang telah ada. Jadi, usaha sampingan hanya ada bagi seseorang yang telah mempunyai usaha pokok. Dan dibandingkan dengan usaha pokok, usaha rumah tangga (sampingan) mempunyai sifat-sifat, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak memiliki kepastian tentang keberlanjutannya.
2. Mempunyai unsur spekulasi.
3. Mempunyai fluktuasi yang lebih besar, dan
4. Lebih dinamis.

Industri kecil merupakan industri yang membutuhkan modal kecil, alat-alat sederhana, tenaga yang mengerjakan cukup anggota keluarga sendiri (bukan buruh upah), jumlah pekerja kurang dari lima orang, dan mutu hasilnya sederhana. Industri ini berfungsi untuk mengisi waktu yang kosong dan sekedar untuk mendapat tambahan penghasilan.

Ciri-ciri industri rumah tangga adalah sebagai berikut (Pangabean, 2004):

- a. Dilakukan di rumah.
- b. Umumnya merupakan tambahan mata pencaharian di samping usaha agraris.
- c. Memerlukan banyak tenaga pekerja tangan
- d. Menggunakan alat-alat dan cara-cara yang sederhana.
- e. Pengetahuan yang sangat terbatas.
- f. Upah sedikit.
- g. Membuat barang untuk keperluan sehari-hari.

Penjabaran kebersamaan nilai-nilai yang dianut anggota kelompok (organisasi usaha) ini oleh Stephen P. Robbins 1998 dalam Sallatang, 2000) diidentifikasi menjadi tujuh karakteristik utama kebersamaan kelompok yaitu kebersamaan dalam:

1. Dorongan inovasi dan pengambilan resiko.
2. Perhatian terhadap hal-hal detail.

3. Penekanan orientasi hasil-kerja ketimbang teknik dan prosesnya.
4. Orientasi orang yaitu dampak keputusan manajemen bagi anggota kelompok.
5. Orientasi kerja-tim.
6. Agresivitas ketimbang santai, dan
7. Penekanan stabilitas atau dinamika pertumbuhan/ perubahan.

Ketujuh karakteristik di atas, eksis di setiap organisasi dalam kadar yang berbeda-beda mulai dari yang rendah/lemah sampai kepada yang tinggi/kuat. Konfigurasi karakteristik organisasi yang muncul dari penilaian ketujuh karakteristik tersebut membentuk persepsi kebersamaan dari anggota organisasi yaitu apa dan bagaimana sesuatu itu berlangsung dalam organisasi dan bagaimana berperilaku yang semestinya.

Nilai-nilai kebersamaan yang terpelihara secara berkelanjutan dan memperlihatkan hasil kerja yang baik selama jangka waktu yang panjang akan membentuk budaya organisasi yang kuat. Berdasarkan pandangan ini, maka wajar kalau muncul hipotesis bahwa budaya organisasi berkorelasi secara positif dengan kinerja perusahaan. Dengan kata lain, makin kuat budaya organisasi maka diharapkan makin tinggi pula kinerja organisasi bersangkutan.

Sedangkan High Smith (dalamDipta, 2004; 18) menyatakan bahwa untuk meningkatkan usaha dan kegiatan industri diperlukan beberapa faktor. Ada empat faktor yang mempengaruhi usaha dan kegiatan industri, yaitu:

a. Faktor Sumber Daya Alam

1. Bahan mentah, Bahan mentah untuk industri merupakan yang terpenting di antara faktor sumber daya. Demikian pentingnya bahan mentah bagi

perindustrian sehingga banyak usaha industri yang didirikan atau ditempatkan di daerah sumber daya mentah atau mendekati sumber bahan mentah atau berdekatan dengan pabrik lain yang produknya dijadikan sebagai bahan baku.

2. Sumber energi, Sumber energi yang digunakan dalam kegiatan industri adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, tenaga listrik, kayu, dan sebagainya.
 3. Penyediaan air, Air berguna untuk bahan pendingin, pencampur, dan pencuci sehingga dalam menempatkan dan menentukan lokasi industri harus memperhatikan air.
 4. Iklim dan bentuk lahan, Iklim akan mempengaruhi aktivitas kerja. Namun, adanya perkembangan teknologi pengaturan udara menyebabkan iklim tidak lagi menjadi faktor yang menentukan. Bentuk lahan berpengaruh terhadap penempatan lokasi industri, baik terhadap bangunan industri maupun prasarana lalu lintas angkutan.
- b. Faktor Sumber Daya Manusia
1. Penyediaan tenaga kerja, Kualitas maupun kuantitas tenaga kerja sangat berpengaruh dalam proses produksi. Penyediaan tenaga bergantung pada jumlah tenaga kerja yang tersedia dan tingkat upah yang berlaku. Pada industri kecil tenaga kerja yang terserap berasal dari daerah setempat.
 2. Keterampilan dan kemampuan teknologi, Suatu industri modern dengan mempergunakan mesin dan produksi massal memerlukan tenaga kerja terdidik dan terlatih.

3. Kemampuan berorganisasi, Semakin kompleks suatu industri, maka semakin kompleks pula pengorganisasiannya. Oleh karena itu, diperlukan tenaga yang berkemampuan tinggi untuk mengorganisasikannya.

c. Faktor ekonomi

1. Pemasaran, Pemasaran sama pentingnya dengan bahan mentah dan sumber energi dalam hal pengaruhnya terhadap perkembangan industri.
2. Potensi pasaran ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan daya belinya. Transportasi, Biaya transportasi sangat penting bagi industri karena bahan mentah harus diangkut dan hasilnya dipasarkan.
3. Modal, Modal sangat diperlukan untuk kegiatan industri. Beberapa macam industri memerlukan modal yang cukup besar. Pada umumnya modal lebih dinamis: bisa bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain dan bisa diperoleh di mana saja. Namun demikian, sumber modal yang penting adalah yang berasal dari penduduk daerah atau negara berupa penghasilan negara dari pajak dan retribusi, tabungan penduduk, dan sebagainya.
4. Nilai dan harga tanah, Harga tanah yang tinggi di pusat kota mendorong usaha industri ditempatkan di daerah pinggiran karena pajak yang berbeda mempengaruhi usaha penyebaran daerah industri.

d. Faktor kebijaksanaan pemerintah

Kebijakan pemerintah mempengaruhi usaha dan perkembangan industri, misalnya ketentuan-ketentuan perpajakan dan tarif, pembatasan

impor-ekspor, pembatasan jumlah dan macam industri, penentuan daerah industri, dan pengembangan kondisi dan iklim yang menguntungkan usaha.

Lebih lanjut (Dipta,. 2004) mengemukakan bahwa ada sembilan faktor yang mempengaruhi maju mundurnya suatu industri rumah tangga, yaitu:

- a. Tenaga kerja harus terampil dalam bidang industri yang bersangkutan. Oleh karena itu, industri membutuhkan pengkhususan di masyarakat.
- b. Suasana industri, yaitu masyarakat yang mengetahui, membutuhkan, dan mampu membeli barang yang dihasilkan.
- c. Jaringan komunikasi yang mantap merupakan sarana hubungan darat, laut, udara, dan elektronika. Adanya sarana hubungan yang baik akan juga merangsang kegiatan lain seperti perdagangan, meskipun di bidang lain tidak langsung berkaitan dengan industri tersebut.
- d. Terjaminnya persediaan bahan mentah dan bahan baku.
- e. Tenaga, energi, atau bahan bakar.
- f. Pasar dan sarana untuk menjalin permintaan pasar dengan cepat dapat terpenuhi.
- g. Pengangkatan atau manajemen yang arif dan mampu memandang jauh ke depan.
- h. Ketentraman politik dan sosial.
- i. Kemudahan kredit dan kelancaran administrasi.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh Usaha rumah tangga (Usaha Kecil dan Menengah/UKM), meliputi (Dipta,.2004) :

1. Faktor Internal

- a. Kurangnya Permodalan Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.
- c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.

2. Faktor Eksternal

- a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Kebijakan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.
- c. Implikasi Otonomi Daerah. Kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.
- d. Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas

terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu maka diharapkan UKM perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sifat Produk Dengan Lifetime Pendek Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek. 6. Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Upaya untuk Pengembangan UKM Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh usaha rumah tangga (UKM), maka perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut (Dipta., 2004) :

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif. Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman

dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2. Bantuan Permodalan. Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah(UKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sampai saat ini BRI memiliki sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia.
3. Perlindungan Usaha Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undangundang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).
4. Pengembangan Kemitraan Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Pelatihan Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta

keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6. Membentuk Lembaga Khusus Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.
7. Memantapkan Asosiasi Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
8. Mengembangkan Promosi Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.
9. Mengembangkan Kerjasama yang Setara Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha

E. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Dalam studi-studi tentang perubahan social, konsep “pemberdayaan” (empowerment) merupakan antitesis dari konsep “pembangunan” (*development*). Konsep “pembangunan” lebih mencerminkan hadirnya model perencanaan dan

implementasi kebijakan yang bersifat *top-down*, elitis, sedangkan “pemberdayaan” lebih bersifat *bottom-up*, berbasis kepentingan konkret masyarakat (Aziz, 2005;133-134 dalam Kusnadi, 2006).

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktifitas sosialnya, dll.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri (Mardikanto dan Soebiato, 2012; 27-31).

Inti dari kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan adalah terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk terus-menerus melakukan perubahan. Dengan perkataan lain pemberdayaan harus di desain sebagai proses belajar, atau dalam setiap upaya pemberdayaan, harus terkandung upaya-upaya pembelajaran atau penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan lain-lain (Mardikanto dan Soebiato, 2012; 68).

Proses pembelajaran dalam pemberdayaan bukanlah proses mengkurui melainkan menumbuhkan semangat belajar bersama yang mandiri dan partisipatif, (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2012). Sehingga keberhasilan pemberdayaan bukan diukur dari seberapa jauh terjadi transfer pengetahuan, keterampilan atau perubahan perilaku, tetapi seberapa jauh terjadi dialog, diskusi dan pertukaran pengalaman (*sharing*). Karena itu antarafasilitator dan peserta sebagai penerima manfaat dalam kedudukan yang setara, saling membutuhkan dan saling menghormati. Di sini fasilitator, tidak harus lebih pintar atau pintar atau pejabat yang lebih berkuasa, tetapi dapat berasal dari orang biasa yang memiliki kelebihan atau pengalaman yang layak dibagikan (Mardikanto dan Soebianto, 2012; 68).

Mosher (dalam Mardikanto dan Soebianto 2012; 192-193), juga mensyaratkan adanya beragam sarana disetiap lokalitas usaha maupun di distrik usaha. Keadaan beragam sarana dan prasarana yang perlu di perhatikan setiap penyuluh/fasilitator di wilayah kerjanya adalah, keadaan bahan baku atau sarana produksi, keadaan sarana pengangkutan, keadaan penyediaan kredit, keadaan pasar dan keadaan jalan.

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan hidup diwilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah transisi, yang menandai tempat perpindahan

antara wilayah daratan dan laut/sebaiknya (Dahuri dkk. 2001; 5 dalam Kusnadi, 2006).

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Filosofi pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dieksplorasi melalui nilai-nilai yang mendasari hakikat hubungan antara (1) manusia dan Allah Yang Maha Esa, (2) manusia dengan manusia, dan (3) manusia dengan alam (Kusnadi, 2006; 9).

Masyarakat pesisir harus didorong untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memberdayakan dirinya secara berkelanjutan dalam hal ini, filosofi dan strategi pemberdayaan yang mendasarnya harus berakar kuat pada pandangan hidup, sistem nilai, lokal adat istiadat, pranata sosial budaya atau kebudayaan setempat. Dalam proses dan aktifitas pemberdayaan, negara dan seluruh komponen *stakeholders* memiliki tanggung jawab kolektif - sinergis untuk mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir (Kusnadi, 2006; 32).

Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang efektif adalah berbasis kelompok dan berbingkai kelembagaan social atau pranata budaya yang sudah ada di dalam masyarakat. Dasar pemikiran yang menempatkan kelompok sosial yang cukup rentan sebagai basis pemberdayaan social ekonomi masyarakat adalah (1) memperbesar kemampuan sumberdaya dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif yang dimiliki, (2) meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dalam mengakses modal, pasar, teknologi, dan kekuasaan, (3) mengembangkan kemampuan organisasi dan kerja sama pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif, serta

(4) memudahkan kemampuan berintegrasi atau bekerja sama dengan sumber-sumber dan pelaku pertumbuhan ekonomi wilayah lainnya (Kusnadi, 2006).

Akhirnya, pemberdayaan masyarakat pesisir diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan otonomi mereka dalam mengelola potensi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan sebagai jalan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka dan generasinya. Dengan demikian, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat pesisir dapat dicapai, dinamika sosial ekonomi lokal berkembang dan potensi sumber daya alam terjamin kelestariannya (Kusnadi, 2006)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerimaan manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi sering rancuh dengan metode, teknik, atau taktik (Mardikanto, 2012).

Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu (Mardikanto, 2012; 168) :

1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat.

3. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut (Mardikanto, 2012; 69) :

1. Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan dari pengamatan lapangan.
2. Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
3. Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

Ismawan (Mardikanto, 2012; 170) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari :

1. Pengembangan sumberdaya manusia
2. Pengembangan kelembagaan kelompok
3. Pemupukan modal masyarakat (swasta)
4. Pengembangan usaha produktif
5. Penyediaan informasi tepat-guna

Menurut Suharto (Mardikanto, 2012) terhadap strategi pemberdayaan masyarakat, ia mengemukakan adanya 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu:

1. Motivasi, dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan pelatihan-pelatihan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencarian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan diluar wilayahnya.
3. Manajemen diri, setiap kelompok-masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

4. Mobilisasi sumberdaya, untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.
5. Pembangunan dan pengembangan jejaring, pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, kelima aspek pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui 5 (lima) P *Strategi pemberdayaan* yang dapat yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan Suharto (dalam Mardikanto, 2012):

1. *Pemungkinan*: yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat;

2. *Penguatan*, melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka;
3. *Perlindungan*, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. *Penyokongan*, atau memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. *Pemeliharaan*, dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dalam hubungan ini, Mardikanto, 2004 (Mardikanto,2012) menyimpulkan bahwa apapun strategi pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan, harus memperhatikan upaya-upaya:

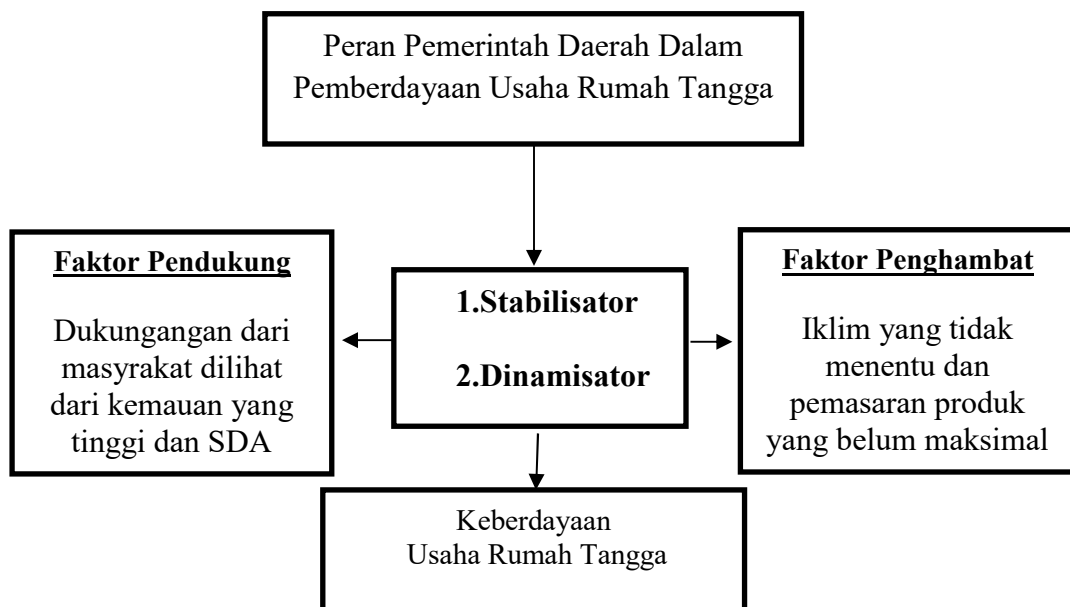
1. Membangun komitmen untuk mendapatkan dukungan kebijakan, social dan financial dari berbagai pihak terkait;
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat;
3. Melengkapi sarana dan prasaranakerja para fasilitator;
4. Memobilisasi dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada

F. Kerangka Pikir

Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Rumah Tangga Di Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maaka Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pemberdayaan usaha rumah tangga di wilayah pesisir. sebagai; Stabilisator dan Dinamisator. Dan berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan melalui peningkatan kemampuan berusaha di pasilitasi dengan akses permodalan dan dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambarkan bagan kerangka pikir sebagai berikut.

Bagan Kerangka Pikir



G. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha rumah tangga di wilayah pesisir kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai stabilisator yang menciptakan kondisi usaha yang kondusif dan bantuan permodalan dengan sebagai dinamisator yang meliputi pengembangan kemitraan dan pelatihan, juga terkait dengan faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah daerah dalam pemberdayaannya.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha rumah tangga meliputi:

1. Stabilisator yakni menjaga kestabilan agar tetap terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Hubungan yang ada dalam konsep pemberdayaan usaha rumah tangga ialah Penciptaan kondisi Usaha yang Kondusif: antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan, penyederhanaan prosedur perijinan, keringanan pajak/retribusi. Bantuan Permodalan, meliputi pemberian kredit, bantuan langsung, penyediaan alat/bahan.
2. Dinamisator yakni pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan usaha rumah tangga seperti Pengembangan Kemitraan, meliputi perluasan daerah pemasaran dan penyediaan bahan baku dari luar. Pelatihan, meliputi pelatihan kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta pelatihan keterampilan pengembangan usaha.

3. Faktor Pendukung yang dimaksud ialah Dukungan masyarakat dan Sumberdaya alam (SDM)
4. Faktor penghambat yang dimaksud ialah Iklim alam tak menentu dan Pemasaran yang belum maksimal terhadap produk
5. Usaha rumah tangga yang dimaksud adalah usaha sampingan yang dilakukan oleh rumah tangga di wilayah pesisir di luar pekerjaan pokok (kenelayanan), meliputi: kerupuk amplang, Baksoikan, nugetikan, ikan Kering, kerupukikan, Roti isi abon, Gogos isi abon, dan Ikan Asap

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ialah selama 2 bulan dan lokasi penelitian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan objek penelitian kelompok usaha rumah tangga dan Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan pertimbangan bahwa kelompok usaha rumah tangga di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami perkembangan yang kurang baik jumlah maupun jenisnya.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan.

2. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian temografi kualitatif. Penelitian deskriptif yang menggambarkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan

memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

C. Sumber Data

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
2. Data sekunder, adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik (*Purposive Sampling*) yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.

Informan dari penelitian ini adalah:

Tabel 1 : Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	JUMLAH
1	Ahmad, SP	AM	Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan	1 Orang
2	Sanawiah, S.ST	SN	Kasi Kemitraan Usaha Iptek dan Informasi Usaha Kacil Pembudidayaan Ikan	1 Orang
3	Tamrin, S.Pi	TM	Kasi Pendidikan Pelatihan Pendampingan Pembudidayaan Ikan	1 Orang
4	Mustakin, S.Pi	MT	Kasi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan	1 Orang

5	Mariam	MR	Pelaku Usaha	1 Orang
6	M. Nasrul	MN	Pelaku Usaha	1 Orang
7	Kartini	KT	Pelaku Usaha	1 Orang
8	Sarwana	SW	Pelaku Usaha	1 Orang
Total Informan				8 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi yakni peneliti mengadakan pengamatan langsung dari objek yang akan diteliti, sehingga mendapatkan data-data factual dari objek tersebut. Dengan demikian metode observasi bisa dilakukan dan digunakan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena yang dimaksud yang turut menentukan hasil dari penelitian yang ada.
2. Wawancara (*Interview guide*) kepada setiap informan, dimana dalam pengumpulan data dan informasi dilakukan Tanya jawab secara langsung dengan subyek penelitian. Wawancara mendalam juga di gunakan untuk memperoleh data-data mengenai hal-hal yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Dokumentasi, penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literature dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan usaha rumahtangga.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif dilakukan dengan menggambarkan data-data tentang bagaimana peran pemerintah daerah

dalam pemberdayaan usaha rumah tangga di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisis dapat tersebut diberi makna dan arti yang berguna dalam pemecahan masalah penelitian.

Menurut Sugiyono (2009) penelitian kualitatif ialah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada Filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpuk pada latar belakang alamiah secara holistik, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang di lakukan di sepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Di samping itu, pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang di hadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa dalam menganalisis data terdapat berbagai cara, sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data ialah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang di peroleh didalam lapangan di tulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya

c. Conclusion drawing/verification

Dari data yang di peroleh, kemudian di kategorikan, di cari tema dan polanya kemudian di tarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang di temukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

G. Keabsahan Data

Data penelitian yang dikumpul diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau kredibel, oleh karena itu pentingnya dalam melakukan peabsahan data. Menurut Sugiyono, (2010) dalam melakukan pengabsahan data dapat ditempuh melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan masa pengamatan yang dikumpulkan dianggap belumcukup sehingga dilakukan perpanjangan dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang diperoleh sebelumnya. Olehkarenaitu, peneliti menghubungi kembali kepada informan/ responden untuk mengumpulkan data sekunder yang di perlukan.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan waktu. Dengan demikian triangulasi terbagi sebagai berikut;

- a. *Triangulasi sumber*, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. *Triangulasi teknik*, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. *Triangulasi waktu*, waktu juga sering berpengaruh mengenai Kredibilitas data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Wilayah Penelitian

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki luas wilayah daratan 898,29 Km² dan wilayah laut 11.464,44 Km². Panjang garis pantainya sejauh 250 Km, yang membentang dari barat ketimur. Kabupaten ini memiliki 13 kecamatan, dimana 9 kecamatan berada diwilayah daratan dan 4 kecamatan terletak di wilayah Kepulauan dari 13 kecamatan tersebut kecamatan Balocci merupakan kecamatan terluas sekitar 14.308 Km² atau 12,90%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2012 secara keseluruhan 13,294 jiwa, kecamatan Mandalle yang terbesar jumlah penduduk miskinnya yaitu 1,308 dan kecamatan Balocci yang terendah jumlah penduduk miskin sekitar 382 jiwa

1.1 Gambaran Umum Geografis

Secara geografis, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan, baik arah utara – selatan maupun arah timur – barat. Sesuai dengan arahan pengembangan, wilayah diterjemahkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam visinya mewujudkan desa modern yang produktif dan berkarakter menuju daerah yang lebih baik dan mandiri. Dalam rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara garis besar dapat digambarkan sebagai sebuah Kabupaten dengan fungsi dan peran yang perlu didukung dengan berbagai kebijakan-kebijakan

pembangunan dalam menunjang perwujudan dan pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, Sehingga dengan demikian maka fasilitas pelayanan antar wilayah banyak dikembangkan di Kabupaten ini.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak pada posisi geografis 040.40-080.00' Lintang Selatan dan 11.00' Bujur Timur, dan secara administrasi berbatasan dengan :

1. Sebelah Timur : Kabupaten Bone
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Maros
3. Sebelah Barat : Pulau Kalimantan, Jawa, Madura, Nusa Tenggara, dan Bali
4. Sebelah Utara : Kabupaten Barru

Selanjutnya, wilayah administrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibagi dalam 13 (Tiga Belas) kecamatan yang terbagi dalam dua wilayah yaitu 9 bagian daratan 4 bagian kepulauan yang terdiri darikelurahan :

1. Kecamatan Balocci, meliputi 6 (Enam) Kelurahan/desa, yakni :
 - a. Kelurahan/Desa Balleangin
 - b. Kelurahan/Desa Balocci Baru
 - c. Kelurahan/Desa Kassi
 - d. Kelurahan/Desa Tonasa
 - e. Kelurahan/Desa Tompo Bulu
2. Kecamatan Bungoro, meliputi 8 (Delapan) Kelurahan/Desa, yakni :
 - a. Kelurahan/Desa Biring Era
 - b. Kelurahan/Desa Boriappaka

- c. Kelurahan/Desa Bowong Cindea
 - d. Kelurahan/Desa Mangilu
 - e. Kelurahan/Desa Samalewa
 - f. Kelurahan/Desa Sapanang
 - g. Kelurahan/Desa Tabo-Tabo
 - h. Kelurahan/Desa Bulu Cindea
3. Kecamatan Labakkang, meliputi 13 (Tiga Belas) Kelurahan/Desa, yakni :
- a. Kelurahan/Desa Bara Batu
 - b. Kelurahan/Desa Batara
 - c. Kelurahan/Desa Bonto Manai
 - d. Kelurahan/Desa Borimasunggu
 - e. Kelurahan/Desa Gentung
 - f. Kelurahan/Desa Kanaungan
 - g. Kelurahan/Desa Kassi Loe
 - h. Kelurahan/Desa Labakkang
 - i. Kelurahan/Desa Manakku
 - j. Kelurahan/Desa Mangalekanna
 - k. Kelurahan/Desa Pattalassang
 - l. Kelurahan/Desa Bundata Baji
 - m. Kelurahan/Desa Taraweang
4. Kecamatan LiukangKalmas (Kalukuang Masalima) meliputi 7 (Tujuh) Kelurahan/Desa, yakni :
- a. Kelurahan/Desa Dewakang

- b. Kelurahan/Desa Doang-Doangan lombo
 - c. Kelurahan/Desa Kalu-kalukuang
 - d. Kelurahan/Desa Kanyurang
 - e. Kelurahan/Desa Marasende
 - f. Kelurahan/Desa Pammas
 - g. Kelurahan/Desa Sabaru
5. Kecamatan Liukan Tangaya meliputi 8 (Delapan) Kelurahan/Desa yaitu;
- a. Kelurahan/Desa Balo-Baloang
 - b. Kelurahan/Desa Kapopposang Bali
 - c. Kelurahan/Desa Pole Onro
 - d. Kelurahan/Desa Sabalana
 - e. Kelurahan/Desa Sailus
 - f. Kelurahan/Desa Sapuka
 - g. Kelurahan/Desa Satanger
 - h. Kelurahan/Desa Tampaang
6. Kecamatan Mandalle meliputi 6 (Enam) Kelurahan/Desa yaitu;
- a. Kelurahan/Desa Benteng
 - b. Kelurahan/Desa Boddie
 - c. Kelurahan/Desa Coppo
 - d. Kelurahan/Desa Mandalle
 - e. Kelurahan/Desa Manggalung
 - f. Kelurahan/Desa Tamanrupa
7. Kecamatan Ma'rang meliputi 10 (Sepuluh) Kelurahan/Desa yaitu;

- a. Kelurahan/Desa Alesipitto
 - b. Kelurahan/Desa Attang Salo
 - c. Kelurahan/Desa Bonto-Bonto
 - d. Kelurahan/Desa Ma'rang
 - e. Kelurahan/Desa Padang Lampe
 - f. Kelurahan/Desa Pitu Sunggu
 - g. Kelurahan/Desa Pitue
 - h. Kelurahan/Desa Punranga
 - i. Kelurahan/Desa Talaka
 - j. Kelurahan/Desa Tamangapa
8. Kecamatan Minasa Te'ne meliputi 8 (Delapan) Kelurahan/Desa yaitu;
- a. Kelurahan/Desa Biraeng
 - b. Kelurahan/Desa Bontokio
 - c. Kelurahan/Desa Bontoa
 - d. Kelurahan/Desa Kalabbirang
 - e. Kelurahan/Desa Minasa Te'ne
 - f. Kelurahan/Desa Bonto Langkasa
 - g. Kelurahan/Desa Kabba
 - h. Kelurahan/Desa Panaikang
9. Kecamatan Pangkajene meliputi 9 (Sembilang) Kelurahan/Desa yaitu;
- a. Kelurahan/Desa Jagong
 - b. Kelurahan/Desa Tumampua
 - c. Kelurahan/Desa Anrong Appaka

- d. Kelurahan/Desa Sibatua
 - e. Kelurahan/Desa Pabundukang
 - f. Kelurahan/Desa Bonto Perak
 - g. Kelurahan/Desa Mappasaile
 - h. Kelurahan/Desa Paddoangan-Doangan
 - i. Kelurahan/Desa Tekolabua
10. Kecamatan Segeri meliputi 6 (Enam) Kelurahan/Desa yaitu;
- a. Kelurahan/Desa Baring
 - b. Kelurahan/Desa Bawasalo
 - c. Kelurahan/Desa Bone
 - d. Kelurahan/Desa Bonto Matene
 - e. Kelurahan/Desa Parenreng
 - f. Kelurahan/Desa Segeri
11. Kecamatan Tondong Tallasa meliputi 6 (Enam) Kelurahan/Desa yaitu;
- a. Kelurahan/Desa Bantimurung
 - b. Kelurahan/Desa Bonto Birao
 - c. Kelurahan/Desa Bulu Tellue
 - d. Kelurahan/Desa Lanre
 - e. Kelurahan/Desa Malaka
 - f. Kelurahan/Desa Tondongkura
12. Kecamatan Liukang Tupabbiring meliputi 9 (Sembilan) Kelurahan/Desa yaitu;
- a. Kelurahan/Desa Mattaro Adae

- b. Kelurahan/Desa Mtti-ro Bintang
 - c. Kelurahan/Desa Mattiro Bone
 - d. Kelurahan/Desa Mattiro Deceng
 - e. Kelurahan/Desa Mattiro Dolangeng
 - f. Kelurahan/Desa Mattiro Langi
 - g. Kelurahan/Desa Mattiro Matae
 - h. Kelurahan/Desa Mattiro Sompae
 - i. Kelurahan/Desa Mattiro Ujung
13. Kelurahan Tupabbiring Utara meliputi 7 (Tujuh) Kelurahan/Desa yaitu;
- a. Kelurahan/Desa Mattiro Baji
 - b. Kelurahan/Desa Mattiro Bombang
 - c. Kelurahan/Desa Mattiro Bulu
 - d. Kelurahan/Desa Mattiro Kanja
 - e. Kelurahan/Desa Mattiro Labangeng
 - f. Kelurahan/Desa Mattiro Ulang
 - g. Kelurahan/Desa Mattiro Walie

Memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, secara administrasi terbagi dalam 13 (Tiga Belas) kecamatan dan 103 (Seratus Tiga) kelurahan/Desa, dan dengan luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Daratan 898,29 Km² dan laut 11.464,44Km²

Kondisi topografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, secara umum terbagi dalam 3 (Tiga) morfologi, yakni i) dataran ii) perbukitan iii) kepulauan.

Bentuk lahan terletak di wilayah dataran, dan secara umum merupakan daerah yang cukup padat, pusat aktifitas.

1.2 Gambaran Umum Kependudukan

Tahun 2015 penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebanyak 323.597 Jiwa, yang terdiri dari perempuan sebanyak 167.309 jiwa dan laki-laki sebanyak 156.288 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 291 jiwa/Km. Hingga tahun 2015 sex ratio antara jumlah laki-laki dan perempuan sebesar 0,93 yang berarti terdapat sekitar 0,93 Laki-laki diantara 100 Perempuan. Akibat pergeseran sex ratio ini atau laki-laki lebih banyak menurun diduga salah satu penyebabnya karena penduduk laki-laki di daerah ini lebih banyak keluar daerah untuk sekolah, bekerja dan mencari

Selanjutnya tingkat kepadatan penduduk yang terbesar berada di Kecamatan Labakkang, dengan angka sebesar 465 jiwa/km², dan yang terendah adalah Kecamatan Tondong Tallasa, yakni sebesar 80 jiwa/km². Sedangkan kelurahan yang paling padat berada di Kelurahan Minasa Te'ne.

Selanjutnya komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan angkatan kerja 135.420 orang terdiri dari 91.275 laki-laki dan 44.145 perempuan sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja 121,20% dan tingkat pengangguran 7,01%

2. Profil Usaha Rumah Tangga

Industri Rumah Tangga di wilayah pesisir merupakan Usaha mikro, usaha ini tergolong jenis usaha marginal, ditandai dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah, serta

cenderung berorientasi pada pasar lokal. Namun demikian, usaha mikro berperan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan.

Gambar 1: Ciri-Ciri Industri Rumah Tangga



Di samping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal, dan berpotensi meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dalam keluarga.

Ciri-ciri usaha mikro industri rumah tangga, antara lain, modal kecil, dikerjakan oleh anggota keluarga, jumlah pekerja 1-10 orang, relatif tidak berbadan hukum, tidak jelas pembagian kerja, dan menggunakan teknologi sederhana.

Bentuk permodalan yang di salurkan kepada pelaku usaha rumahan ini dapat berbentuk alat-alat yang sesuai dengan produk olahan yang di kembangkan dan di sertakan dengan pelatihan yang di lakukan tiga kali dalam setahun untuk menambah wawasan kepada kelompok usaha rumah tangga.

(Tabel 2) Penerima Bantuan Permodalan

No	Nama Usaha	Bantuan Alat	Jumlah
1	Melati	Cetak kripik, Blender dan Mixser	4 Buah
2	Sipadecengi	Mesin Pengolahan	2 Buah
3	Assahrah	Mesin Pengolahan	2 Buah
4	Turu Cinnac	Mesin Pengolahan	2 Buah
5	Bakso Bandeng	Mesin Pemisah, Mesin Penggiling dan Mesin Pengaduk Abon	6 Buah
6	Bandeng Tanpa Duri	Meja Kerja, Mesin Pres Kemas	3 Buah
7	Hafizah	Tempat Penjemur, Kompor Gas	1 Buah
8	Para Ikatte Melati	Meja Kerja dan Mesin Pres Kemas	3 Buah
9	Bandeng Jaya	Mesin Pengolah	2 Buah
10	Poklashar Cahaya	Mesin pengolah	2 Buah
11	Al Taufiq	Mesin Pengolah	2 Buah
12	Teratai	Mesin Pengolah	2 Buah
13	Siamasei	Cetak Kripik, Blender dan Mixcer	4 Buah
Total			32 Buah

R/C Ratio, merupakan alat analisa untuk mengukur biaya dari suatu produksi.

Makin besar nilai R/C Ratio, maka usaha pengolahan makin bagus atau keuntungannya makin besar, sehingga bagi masyarakat dapat memilih usaha mana yang paling menguntungkan untuk di kembangkan.

Secara umum hanya tiga (3) dari produk olahan tersebut yang sekarang ini mampu untuk menjadi produk unggulan, ketiga produk olahan tersebut adalah Olahan Bandeng, Presto, dan Kripik Bandeng. Jumlah produksi abon ikan dengan produksi rata-rata (40 kg/bln) dengan beberapa produk olahan lainnya, bakso ikan (25 kg/bln), Amplang Bandeng (11 kg/bln) menunjukkan minimnya produk olahan ikan.

(Tabel 3). Produk Olahan Perikanan

NO	Nama Komoditi	Produksi (Kg)	Pemasaran Sekarang	Segementasi pemasaran kedepan selain pemasaran sekarang
1	Abon Ikan	41	Pasar Luar Daerah, Pasar Lokal	Toko, Pasar moderen, regional, ekspor
2	Bandeng Presto	39	Pasar Luar Daerah	Toko, Pasar moderen, regional, ekspor
3	Rempeyek udang	102	Tetangga, Sekolah, Pasar Lokal	Toko, Pasar moderen, regional, ekspor
4	Bakso Ikan	25	Pasar Luar Daerah	Toko, Pasar moderen, regional, ekspor
5	Ikan Kering Asin	300	Pasar Lokal	Toko, Pasar moderen, regional, ekspor
6	Kripik Rumput Laut	100	Pasar Lokal	Toko, Pasar moderen, regional, ekspor
7	Amplang Bandeng	11	Pasae Lokal	Toko, Pasar moderen, regional, ekspor

Sumber: Dinas Perikanan Pangkep, 2018

Tingginya permintaan kebutuhan ikan asin telah memacu usaha penangkapan oleh nelayan lokal. Ukurannya yang kecil, dan bersih serta mudah dalam penyajiannya menjadikan produk olahan ini mudah dipasarkan dan sangat diminati oleh konsumen.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, usaha mikro dan usaha kecil

telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian daerah. Sebagai gambaran, pada tahun 2013 tenaga kerja industri mencapai 13.742 orang yang diserap sector industry daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Secara umum, beberapa karakteristik usaha yang dapat diamati di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah:

1. Bersifat informal dan tidak berbadan hukum;
2. Bersifat fluktuatif baik dari segi omzet maupun tenaga kerja. Omzet dan tenaga kerja bergantung pada permintaan, musim, serta ketersediaan bahan baku.
3. Tanpa atau hanya menggunakan teknologi sederhana.
4. Pelaku usaha mikro relatif mudah berganti jenis usaha.

2.1 Abon Ikan

Abon ikan merupakan jenis produk diversifikasi olahan ikan secara tradisional. Bahan baku abon ikan dapat dipergunakan dari berbagai jenis ikan non ekonomis dan ikan-ikan berdaging merah yang pemanfaatannya dalam diversifikasi olahan sangat terbatas serta sisa hasil produksi (*by-prosess*) yang berupa tetelan dari proses pengolahan lain dan fellet dapat di manfaatkan untuk memberikan nilai tambah.

2.2 Ikan Asin

Ikan asin adalah ikan setengah basah yang mengandung garam 15-20%. Walaupun kadar airnya masih tinggi (30-35%) ikan asin dapat disimpan agak lama karena kandungan garam yang relatif tinggi tersebut. Produksi olahan ikan Asin yang ada di Kabupaten Pangkajene masih

dilakukan dengan sangat sederhana dan sangat tergantung pada bahan baku tangkapan nelayan.

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam pemberdayaan Usaha Rumah Tangga di Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

1. Stabilator

Peran dari pemerintah cukup bervariasi, salah satunya mengenai peran stabilatornya. Stabilator yaitu menjaga kestabilan agar tetap terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang ada dapat terlaksana dengan baik. Terkait dengan peran pemerintah terhadap pemberdayaan usaha rumah tangga di wilayah pesisir, terdapat beberapa indikator yang menjadi acuan dalam mendapatkan informasi.

a. Penciptaan Kondisi Usaha Yang Kondusif

Dalam melakukan berbagai kegiatan pasti diperlukan yang namanya jaminan atau pegangan yang membuat keyakinan tercipta atas keberlangsungan sesuatu, terutama dalam hal usaha. Upaya-upaya yang berhubungan dengan penciptaan kondisi usaha yang kondusif seperti; keamanan usaha, perizinan dan juga keringanan pajak atau retribusi. Penciptaan kondisi usaha yang baik di atur dalam pasal 1 ayat (9) undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah berbunyi Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Mengenai hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Pak Ahmad selaku Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mengatakan:

“Sudah jauh-jauh hari kami memikirkan hal seperti ini untuk keberlangsungan usaha rumahan ini yang sudah menjadi komitmen kami untuk meyakinkan para masyarakat, dengan cara terus memonitoring para pelaku usaha agar mereka berkeyakinan bahwa usaha rumahan ini aman dan mendapat dukungan yang tinggi dari pemerintah, salah satunya tak ada biaya pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha ini karena keberlangsungan dari usaha mereka belum jelas kedepannya dan skala produksinya masih kurang.” (Hasil wawancara AM, 19 Februari 2018)

Hasil wawancara di atas dengan Bapak Kepala Bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di Kabupaten ini menunjukkan bahwa upaya penciptaan usaha yang kondusif sudah dilakukan, berupa dukungan moril dan pembayaran pajak di sesuaikan karena rospek kedepannya masih belum jelas. Karena itu sudah komitmen untuk menjamin keberlansungan usaha rumahan ini, yang menjadi modal untuk membangun mental masyarakat setempat supaya mau melakukan usaha. Senada dengan hasil wawancara penulis terhadap Kasi kemitraan usaha iptek dan informasi usaha kecil Dinas Perikanan Pangkep mengatakan:

“Kami sangat memberikan dukungan kepada masyarakat yang mau menjalankan usaha rumahan ini, jadi kami bangun mereka dengan memperlihatkan usaha-usaha yang telah sukses seperti usaha rumahan mereka. Sehingga mereka akan yakin akan usaha rumahan ini disini mental mereka yang kami upayakan berubah agar dapat memanfaatkan potensi yang ada” (Hasil wawancara SN, 19 Februari 2018)

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa pola pikir dari masyarakat harus berubah agar mereka mau menjalankan usaha rumahan ini dengan cara memberikan motivasi, hal-hal yang inspiratif dan keyakinan bahwa usaha rumah tangga ini dapat bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Para masyarakat biasanya

di bawa untuk berkunjung ke usaha-usaha rumah tangga yang sudah bisa di katakana telah mencapai ekspektasi yang diharapkan. Wawancara penulis dengan pelaku usaha rumah tangga mengatakan:

“Kami cukup senang dengan dukungan pemerintah setempat, apalagi usaha rumah tangga ini dapat mengurangi pengangguran khususnya bagi ibu-ibu dan membantu perekonomian keluarga” (Hasil wawancara SW, 27 Februari 2018)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa kemauan masyarakat untuk menjalankan usaha rumah tangga karena sudah merasa sangat mendapatkan dukungan dari pemerintah. Hal yang sama diutarakan oleh pelaku usaha lainnya berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa:

“Kami sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan seperti ini apalagi langsung ada jaminan dari pemerintah setempat untuk keberlangsungan usaha kami ini, harapan kami mudah-mudahan usaha rumah tangga ini dapat bersaing dan bertahan dalam jangka yang panjang” (Hasil wawancara MR, 27 Februari 2018)

Penciptaan iklim usaha yang kondusif berarti upaya yang diciptakan untuk meringankan menjalankan usaha, dan disini berupa usaha rumahan yang ada diwilayah pesisir. Terkait hal ini senada dengan pernyataan wawancara di atas, pemerintah daerah yang diwakili dinas Perikanan Pangkep memberikan keringanan usaha dengan tidak menarik pajak pada para pelaku usaha rumah tangga, hal ini sesuai dengan hasil wawancara kami dengan Kasi Pendidikan Pelatihan Pendampingan Pembudidayaan Ikan bahwa:

“Kami tidak meminta pajak dari para pelaku usaha rumah tangga ini karena usaha mereka itu belum bisa dikategorikan sebagai usaha yang akan terus ada, artinya belum ada kepastian keberlangsungannya sampai kapan dan juga hasil produksi dari usaha rumah tangga ini masih berskala kecil” (Hasil wawancara MT, 19 Februari 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah tidak memungut pajak dari usaha rumah tangga karena usaha tersebut tidak continue dan masih berskala kecil. Hal seperti ini harus selalu dikedepankan guna menarik minat masyarakat untuk melakukan usaha rumah tangga sehingga dapat lebih mandiri dan dapat menambah pemasukan bagi keluarganya masing-masing. Ini yang menjadi daya tarik masyarakat untuk menjalankan usaha rumah tangga karena tidak ada pembayaran pajak. Hal seperti ini harus sudah jadi kewajiban pemerintah untuk tidak memungut pajak dari pelaku usaha rumah tangga karena mereka itu perlu diberdayakan khususnya dari sector ekonomi, jadi tidak mungkin mereka bisa melakukan usaha rumah tangga bila harus dimintai pembayaran pajak usaha.

Pelaku usaha rumah tangga ini akan baru membayar pajak ketika mereka sudah mandiri, yakni ketika usaha mereka telah berkembang dengan baik dan produksinya sudah meningkat. Hal-hal inilah yang menjadi prospek kedepannya sehingga konsep pemberdayaan berhasil dan ketergantungan masyarakat sudah bisa teratasi.

Mengenai keamanan usaha rumah tangga disini yaitu adanya jaminan dari pemerintah akan keberlangsungan usaha, aman dari ancaman sekitar maupun luar, hal ini berimplikasi pada lingkungan bagi para pelaku usaha perlu diperhatikan juga karena ini juga salah satu hal penting dalam menjalankan suatu usaha rumah tangga. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kasi Kemitraan Usaha Iptek dan Informasi Usaha Kecil gatakan:

“Dalam menciptakan usaha yang kondusif kami dari pihak dinas melihat bahwa usaha harus disesuaikan dengan lingkungan, lingkungan yang pro akan usaha

rumah tangganya sehingga saling membantu dan adanya keselarasan antara hasil produksi dengan kebutuhan sekitar, bila ini sudah terpenuhi akan lebih memungkinkan kelangsungan dari usaha-usaha ini. Ini juga harus didukung dengan tenaga-tenaga ahli agar dapat bersaing dilingkungan pasar ”(Hasil wawancara SN 09 Maret 2018)

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa betapa pentingnya lingkungan untuk menjalankan usaha rumah tangga agar saling bersinergi dengan baik, sehingga akan lebih menyedot perhatian warga setempat bukannya memberi hal-hal negative tapi sebaliknya yang diharapkan, juga disebutkan bahwa perlu dukungan dari tenaga-tenaga ahli agar menghasilkan produk-produk yang bermutu. Mengenai tenaga ahli ini dapat terwujud jika diadakan yang namanya pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha rumah tangga, hal ini akan di bahas pada penjelasan berikutnya.

Kembali mengenai masalah lingkungan yang harus disesuaikan dalam melakukan usaha rumah tangga, hal ini memang cukup penting karena lingkungan yang menjadi factor penentu suatu persoalan apalagi berbicara mengenai masalah usaha rumah tangga yang masih sangat perlu dukungan dari berbagai kalangan. Hal ini dirasakan oleh salah satu pelaku usaha berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Pelaku Usaha yang mengatakan:

“Usaha kami ini sangat didukung oleh lingkungan kami, kami sangat didukung warga-warga sekitar sini dalam menjalankan usaha, terus akses untuk mendapatkan bahan baku cukup mudah, karna kami selalu bersinergi dengan masyarakat sekitar lingkungan kami” (Hasil wawancara MN 09 Maret 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa lingkungan menjadi salah satu factor pendukung dalam menjalankan usaha rumah tangga karena sangat berperang dalam hal memberikan sumbangsi yang penting baik dari segi tenaga,

kebutuhan (bahan baku) sampai kepada dukungan moril. Lingkungan juga dapat membantu dalam hal memasarkan produk, seperti yang di utarakan dari pelaku usaha rumah tangga lainnya dalam hal ini produksi kripik Peyek Udang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pelaku Usaha mengatakan:

“Kami disini memproduksi kripik peyek udang dan cukup terbantu dalam hal pemasaran, karena produk kami ini dipasarkan di teman yang dekat-dekat kios-kios penjualannya sehingga lebih mudahlah dalam pemasarannya dan juga sudah kami percayai karena orang dekat dilingkungan kami” (Hasil wawancara SW , 09 Maret 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bila lingkungan membantu dalam memasarkan produk, betapa pentingnya faktor lingkungan di sini yang menjadi sokongan semangat tersendiri. Penciptaan usaha kondusif juga berhubungan dengan perizinan untuk menjalankan usaha rumah tangga, jadi bagaimana perizinan dalam usaha rumah tangga di wilayah pesisir ini? Apa mendapatkan perizinan yang berbelit-belit atau mereka diberikan kemudahan. Dalam hal ini penulis mendapatkan keterangan dari Kasi Pendidikan Pelatihan Pendampingan Pembudidayaan Ikan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pendidikan Pelatihan Pendampingan Pembudidayaan Ikan mengatakan:

“Kami sangat berupaya menumbuhkan minat masyarakat dalam melaksanakan usaha rumahan yang berbasis perikanan ini, salah satunya dengan cara perizinan yang sangat dipermudah, bermodal kemauan yang sungguh-sungguh dan ingin mengembangkan potensi yang ada maka kami sangat siap untuk memfasilitasinya. Jika kami melihat usaha yang sebelumnya sudah berjalan kami masuk dan berupaya mengembangkan usaha mereka, bahkan kami juga berupaya menciptakan usaha rumah tangga apa yang cocok bagi mereka ini sudah jadi komitmen pemerintah setempat dalam upaya memberdayakan masyarakat” (Hasil wawancara TM 27 Februari 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam hal perizinan untuk menjalankan usaha dipermudah yang penting diperhatikan adalah kemauan yang

sungguh-sungguh bagi masyarakat untuk menjalankan usaha rumahan. Komitmen dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal ini karena indikator ini yang menjadi dasar dari pemerintah untuk menindaklanjuti dari usaha rumahan ini. Lebih lanjut lagi mengenai perizinan ini berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku usaha rumah tangga lainnya mengatakan:

“Soal perizinan kami diberikan kemudahan, kami mendapatkan izin menjalankan usaha karena kami bersungguh-sungguh. Kami mau mengembangkan potensi, lalu kami dilihat pemerintah setempat lalu di bina dan di fasilitasi” (Hasil wawancara KT 27 Februari 2018)

Hasil wawancara di atas memperjelas bahwa perizinan dalam menjalankan usaha rumah tangga mendapatkan kemudahan asal itu di landasi dengan kesungguh-sungguhan dari pelaku usaha itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peranan pemerintah dalam menciptakan kondisi usaha yang kondusif berupa keamanan/ketentraman usaha, perizinan dan keringanan pajak, pemerintah sudah memberikan sumbangsi yang baik guna menarik minat masyarakat dalam melaksanakan usaha rumahan.

b. Bantuan Permodalan

Dalam melakukan setiap usaha pasti diperlukan yang namanya suatu modal tak terkecuali dengan usaha rumah tangga di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Modal yang akan menjadi pertimbangan seseorang dalam melakukan usaha, semakin banyak modal yang dimiliki semakin tinggi pula peluang untuk mengembangkan sesuatu tak terkecuali hasil yang akan didapat pula. Dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

pada pasal 21 ayat (1) mengatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Dalam usaha rumah tangga ini bantuan permodalannya seperti apa ? Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi mengatakan:

“Kalau bantuan modal berupa uang tidak ada, ini dilakukan agar tidak ada penyelewengan dana. Jadi bantuannya hanya berupa alat yang mendukung produksi usaha.” (Hasil wawancara MT 10 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa bantuan modalnya itu berupa barang/alat yang diperlukan dalam melakukan produksi. Senada dengan hasil wawancara lain yang sumbernya dari pihak pemerintah mengatakan:

“Kalau mengenai soal pemberian bantuan bagi para pelaku usaha rumah tangga ini, kami memberikan bantuan berupa barang/alat yang mereka butuhkan dalam menjalankan usaha.”(Hasil wawancara SN 10 Maret ,2018)

Bantuan modalnya itu dalam usaha rumahan ini yakni barang, misalnya mesin pendingin, box untuk penyimpanan ikan, alat untuk merapikan kemasan, kompor gas, dan sebagainya. Bantuan-bantuan berupa barang ini akan sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya, apalagi mereka ini masih dalam ruang keterbatasan untuk melaksanakan usaha rumah tangga, seperti yang dikatakan salah satu pelaku usaha rumah tangga berdasarkan hasil wawancara penulis yakni:

“Sangat terbantulah, dengan adanya bantuan dari pemerintah setempat dalam bentuk barang, kebetulan usaha rumahan kami ini yakni pemasar ikan, jadi kami disantuni box penyimpanan ikan supaya ikan lebih bertahan lebih lama bila penjualan tak habis maka ikan itu bisa kami simpan” (Hasil wawancara MR,09 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha rumah tangga terbantu dalam hal alat, sehingga cukup mendapatkan keringanan dalam menjalankan

usahanya. Hal yang sama juga di utarakan oleh pelaku usaha lainnya mengenai bantuan yang diterimanya berdasarkan hasil wawancara mengatakan:

“Usaha kami berjalan tak lepas dari sumbangsi pemerintah, yakni wujudnya pemberian alat yang lebih mengefisienkan pekerjaan kami, ya terbantulah dengan hal ini”(Hasil wawancara MN 09 Maret 2018)

Bantuan-bantuan dari pemerintah ini diharapkan dapat menumbuhkan keinginan masyarakat untuk menjalankan usaha rumahan yang berbasis wilayah pesisir, supaya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan dasar partisipatif dari masyarakat setempat. Menjadi dasar dari pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, masyarakat yang bisa keluar dari aspek permasalahan ekonomi yang tentunya mengembangkan potensi di sekitarnya.

Berbicara mengenai bantuan modal berupa barang yang diberikan pemerintah untuk pelaku usaha rumahan di wilayah pesisir, akan timbul pertanyaan sumber bantuan ini dari mana, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AM sebagai Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan pangkep mengatakan:

“Dari pihak pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku usaha rumahan itu bantuannya barang/alat yang mengefisienkan pekerjaan mereka, mengenai soal sumber permodalannya kami ambil dari anggaran APBD dan juga APBN. Pemberian ini kan tidak intens dilakukan tiap tahunnya tergantung dari kebutuhan, jadi bila merasa ada yang perlu bantuan kami usulkan pada Musrenbang ketika diterima akan dilanjutkan pada pembahasan anggaran” (Hasil wawancara AM 23 Februari 2018).

Jadi bantuannya itu barang atau alat yang mereka butuhkan, penganggarnya sendiri dari APBD dan APBN, anggaran dana tidak setiap tahun karena hanya berupa barang yang bisa terpakai bertahun-tahun, jadi bantuannya

dikondisikan sesuai kebutuhannya saat itu, kemudian di usulkan di Musrenbang ketika diterima akan lebih lanjut lagi dibahas dalam hal penganggarannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai peran pemerintah daerah (Dinas Perikanan) Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam hal sebagai stabilator untuk pemberdayaan usaha rumah tangga di wilayah pesisir, terdapat beberapa poin yang ditarik oleh penulis yakni dalam hal penciptaan usaha yang kondusif berupa perizinan dan keringanan pajak pemerintah telah melaksanakan pokok dari hal ini, dapat dilihat dari tak dikenainya pajak bagi para pelaku usaha rumah tangga dan perizinan yang tak rumit. Lalu dalam hal bantuan modal untuk para pelaku usaha rumah tangga, pemerintah memberikan bantuan bantuan berupa barang yang mereka butuhkan dalam menjalankan usaha.

2. Dinamisator

Peran pemerintah lainnya yang menjadi acuan berikutnya yaitu peran sebagai dinamisator, yang masih mengutip dari konsep Siagian (1984:194) yakni pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat dalam hal pembangunan. Terkait dalam hal pemberdayaan usaha rumah tangga di wilayah pesisir, terdapat beberapa hal yang menjadi titik temu antara peran sebagai dinamisator dan pemberdayaan usaha rumah tangga, sebagai berikut.

a. Pengembangan Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi

persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Menciptakan keberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui mekanisme kemitraan yang serasi selaras dan seimbang. Ide dasar kemitraan tersebut dimunculkan sebagai kritik pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down*, yang kemudian memposisikan pemerintah sebagai actor dominan, dan membiarkan sikap ke-acuh-tak-acuhan pihak swasta terhadap proses pemberdayaan kaum lemah. Fenomena munculnya kapitalis birokrasi sesungguhnya juga merupakan akibat dari sikap pemerintah dan swasta. Di harapkan kedepannya pemerintah dan swasta lebih bertanggung jawab terhadap keberadaan kaum lemah.

Apa yang direkomendasikan oleh pola baru di dalam membangun bangsa dan Negara adalah dengan model kemitraan. Dengan cara memberikan peran yang setara kepada tiga actor pembangunan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Terkait hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Kemitraan Usaha Iptek dan Informasi Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mengatakan:

“Soal pengembangan kemitraan dalam usaha rumahan kami memfasilitasi para pelaku usaha rumahan agar lebih memiliki link diluar sehingga pengetahuan, hal-hal yang inspiratif banyak juga merka akan dapat” (Hasil wawancara SN 09 Maret 2018).

Hasil wawancara diatas melihat bahwa perlunya pengembangan kemitraan guna menambah pengetahuan dan sesuatu yang inspiratif sehingga lembaga tidak monoton melainkan lebih berkembang kedepannya. Kemitraan yang berhasil yakni kemitraan yang membuat kedua belah pihak saling menguntungkan sehingga hasilnya maksimal. Kemitraan dalam bidang usaha biasanya identic dengan hal perluasan pemasarng barang. Hal ini juga yang di upayakan pemerintah yakni dinas Perikanan Pangkep yang berperang disini untuk lebih memperluas pemasaran barang hasil produksi usaha rumahan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Kemitraan Usaha Iptek dan Informasi Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mengatakan:

“Dalam hal ini kami berusaha untuk mengembangkan pemasaran agar usaha rumah tangga ini tidak monoton atau tidak hanya berjalan di tempat, untuk itu kami memfasilitasi mereka supaya hasil produksi bisa masuk di toko-toko dan hotel-hotel setempat” (Hasil wawancara SN, 01 Maret 2018).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kemitraan penting dalam pengembangan usaha karena berimplikasi pada pemasaran produksi agar lebih luas lagi dan lebih dikenal dikalangan masyarakat. Hal ini akan membuat para pelaku usaha lebih tertarik untuk terus berproduksi bila ada kejelasan barangnya dipasarkan dimana. Hal ini dirasakan oleh salah satu dari pelaku usaha berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku Usaha yakni:

“Usaha kami ini dibantu oleh pemerintah dalam hal pemasaran, jadi kami bermitra dengan hotel yang letaknya tak jauh dari sini. Produk kami (ikan abon) ini diujakan di hotel sehingga cara pemasarannya cukup bervariasi, ada yang dirumah dan ada pula diluar rumah yakni hotel bahkan ikut dalam pameran” (Hasil wawancara KT 01 Maret 2018)

Wawancara diatas menunjukan bahwa pemerintah membantu para pelaku usaha dalam memperluas pemasaran produk kepihak swasta yakni dibidang

perhotelan. Strategi seperti ini sangat bagus karena seperti yang kita ketahui bahwa di hotel-hotel itu pada umumnya yang tinggal disitu adalah para pendatang yang mempunyai urusan sesaat, jadi bila produk usaha rumahan ini dijajakan di hotel maka sangat terbuka kemungkinan produk-produk ini bisa dijadikan oleh-oleh (buah tangan) yang khas dari daerah, maka produkpun akan masuk daerah-daerah lain.

Pemerintah dalam hal ini harus lebih mengembangkan kepemimpinan yang partisipatif, swasta lebih memberikan kontribusi dalam memberikan energi untuk melaksanakan pemberdayaan bersama pemerintah dan masyarakat, sedangkan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan peluang untuk memberikan peran aktif melalui partisipasi yang sungguh-sungguh. Mengenai soal perluasan pemasaran dalam bentuk kemitraan tidak semuanya berjalan lancar, sesuai hasil wawancara penulis dengan Kasi Kemitraan Usaha Iptek dan Informasi Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sebagai berikut:

“Dalam hal pengembangan kemitraan kami punya prospek dalam menambah perluasan pemasaran agar gairah pelaku usaha rumahan makin tinggi dalam memproduksi, tapi tidak semuanya berjalan lancar, misalnya bila mau memasarkan produk ke toko-toko minimarket hal ini sampai sekarang belum bisa terlaksana karena memiliki syarat-syarat tersendiri” (Hasil wawancara SN 01 Maret 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kemitraan dalam memperluas pemasaran masih ada yang belum sesuai dengan ekspektasi, pemasaran di toko-toko minimarket yang modern masih belum bisa untuk dimasuki menjajahkan produk. Lebih lanjut lagi mengenai hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan yakni:

“Kami sangat mengupayakan dalam hal pengembangan kemitraan bagi usaha rumahan ini, apalagi didalamnya juga menyangkut pemasaran produk, mengenai

pemasaran produk kami masih terkendala di syarat-syarat yang dimiliki oleh minimarket, syaratnya seperti harus ada label halal dari produk, tapi kami upayakan tahun depan kami mendapatkan label halal mudah-mudahan dilancarkan” (Hasil wawancara AM, 01 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah sudah mengupayakan supaya produk usaha rumahan bisa bersaing di tempat-tempat yang lebih modern, tetapi tak bisa terbantahkan bila kendala masih ada. Kemitraan juga berpotensi dalam hal memperoleh bahan baku ataupun stok barang yang diperlukan, hal seperti ini akan sangat membantu dalam menjalankan suatu usaha karena hal-hal yang dibutuhkan sudah jelas keberadaannya sehingga tak perlu kerja keras maupun persaingan untuk mendapatkannya. Hal ini yang dirasakan oleh salah seorang pelaku usaha rumahan sesuai hasil wawancara penulis yakni:

“Usaha kami menjajakan ikan kepemukiman-pemukiman penduduk, jadi kami harus mempunyai sumber dan stok ikan yang jelas, oleh karena itu pemerintah menuntun kami untuk bermitra, dan disini kami bermitra dengan pemegang usaha nelayan yang biasa disebut dengan punggawa” (Hasil wawancara MN, 01 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kemitraan diperlukan dalam rangka memperjelas sumber suatu barang yang diperlukan, sehingga usaha dapat terjamin mengenai stok yang diperlukan dan akses untuk mendapatkannya jadi lebih terbantu. Hal mitra seperti ini akan menguntungkan semua belah pihak.

Kemitraan bagusnya mengadopsi pola simbiosis mutualisme yakni saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan yang optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerja sama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang

bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain.

Lebih lanjut lagi penulis mendapatkan keterangan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kemitraan Usaha Iptek dan Informasi Usaha Kecil sebagai berikut:

“Akan sangat lebih baik lagi bila dalam bermitra itu semua mendapatkan keuntungan atau masing-masing mendapatkan manfaat, hal ini dapat dilihat dari kerjasama antara pelaku usaha rumahan yang produknya oleh pihak pengembangan wisata kuliner, artinya produk bisa diperkenalkan melalui pihak wisata kuliner sedangkan pihak wisata kuliner menjalankan tugasnya dalam memunculkan yang bisa jadi ciri khas daerahnya” (Hasil wawancara SN 09 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa yang bermitra mendapatkan hasil yang sama-sama baik, yakni baik dari pelaku usaha rumahan maupun dari pihak pariwisata kuliner. Bila semua mendapatkan hal yang positif dalam bermitra pasti akan menjamin kerja sama yang lebih baik kedepannya. Berikut tanggapan pelaku usaha rumahan berdasarkan hasil wawancara penulis yakni:

“Kami menyambut baik dari usaha pemerintah disini untuk memfasilitasi kami lebih lanjut ke pihak wisata kuliner, karena ini akan membuat produk kami lebih dikenal, itu modal yang penting terlihat dulu dikalangan yang umum terus kedepannya dapat lebih menarik minat untuk membelinya” (Hasil wawancara SW 23 Februari 2018)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pelaku usaha rumah tangga mempunyai prospek kedepannya berdasarkan kerjasama yang terjadi saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan terkait dengan pengembangan kemitraan untuk usaha rumah tangga disini dapat dilihat bahwa dari kemitraan itu akan membantu mengenai hal pemasaran dan barang yang dibutuhkan. Kemitraan sudah ada yang terjadi baik itu dengan pihak swasta maupun instansi pemerintahan yang lainnya, tetapi masih ada yang terhambat untuk dijalankan. Hal ini menjadi pekerjaan lanjutan bagi pemerintah agar

kedepannya dapat terselesaikan agar nantinya para pelaku usaha rumah tangga tak ragu-ragu lagi dalam menggantungkan kehidupannya dari usaha rumahan.

b. Pelatihan

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi tuntutan perkembangan perencanaan dan pengelolaan sumber daya lautan, diperlukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka, ini juga semangat pemberdayaan yang berusaha membawa masyarakat ke masyarakat yang dapat bersaing atau lebih kompetitif berdasarkan potensi yang ada pada mereka.

Pelatihan sendiri memang perlu diadakan demi menciptakan tenaga-tenaga yang handal di kalangan masyarakat, akan tetapi harus disesuaikan dengan keperluan mereka dalam menjalankan suatu pekerjaan agar lebih tepat sasaran dan mendapatkan hasil yang jelas kedepannya. Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah buat para pelaku usaha rumah tangga dapat berupa aspek manajemen, kewiraswastaan, administasi dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usahanya. Terkait dengan hal ini hasil wawancara penulis dengan Kasi Pendidikan Pelatihan Pendampingan Pembudidayaan Ikan yakni:

“Untuk mengembangkan usaha rumahan ini terlebih dahulu kami perlu mengembangkan orang-orang yang mau bekerja didalamnya, karena semua tergantung orangnya. Untuk itu kami lakukan pelatihan-pelatihan terkait usaha mereka supaya mencetak tenaga-tenaga yang ahli dan siap bersaing didunia pekerjaan sesuai bidang usahanya” (Hasil wawancara TM, 19 Februari 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelatihan sesuatu yang urgen bagi para pelaku usaha rumahan agar bisa bersaing didunia kerja sehingga usaha-usaha rumahan dapat di harapkan dalam penggerak perekonomian khususnya diwilayah pesisir. Lanjut lagi hasil wawancara dengan pihak dinas Perikanan,

Kasi Pendidikan Pelatihan Pendampingan Pembudidayaan Ikan terkait hal pelatihan bagi pelaku usaha rumahan yakni:

“Pelatihan yang kami berikan kepada pelaku usaha yakni biasanya terlebih dahulu mengenai teori tentang usaha, jadi didalamnya mengenai usahanya berbasis apa, terus tujuan dari usaha rumahan ini apa, hingga mereka mengerti dan sadar mengenai pekerjaan mereka” (Hasil wawancara TM, 19 Februari 2018).

Wawancara diatas menunjukkan bahwa perlunya pemahaman bagi para pelaku usaha rumahan supaya lebih mengetahui substansi dari usahanya, ini sangat perlu dilakukan agar kedepannya jelas. Tanggapan dari pelaku usaha rumahan terkait hal ini berdasarkan hasil wawancara yakni:

“Kami sering mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas Perikanan dengan BLK, terkait dengan usaha rumahan. Disana kami diberi penjelasan maksud dari usaha rumahan ini dan betapa pentingnya untuk terus dijalankan” (Hasil wawancara SW, 23 Februari 2018).

Pada awalnya untuk menarik perhatian masyarakat setempat, pemerintah yakni dinas Perikanan mengamati minat masyarakat supaya lebih semangat dalam melaksanakan usaha, jadi disesuaikan minatnya dan kemampuannya saat itu, untuk melihat atau mengetahui hal ini diadakanlah pelatihan yang memperkenalkan jenis usaha. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kasi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan terkait hal ini, sebagai berikut:

“Kami mengadakan pelatihan dasar kepada calon pelaku usaha rumahan yakni mereka dilatih dalam hal menumbuhkan minat dan jenis usaha apa yang mereka sukai dari jenis usaha yang disediakan, setelah diketahui minatnya apa kami lanjut memfasilitasi mereka, ini bagi masyarakat yang baru mau dicarikan jenis usaha berbasis perikanan” (Hasil wawancara MT 01 Februari 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dari awal sebelum berlangsungnya beberapa usaha terlebih dahulu di adakan pelatihan yang

bertujuan menumbuhkan minat, sehingga kedepannya lebih berselera dalam menjalankan usaha rumah tangga dan berharap dapat mengatasi permasalahan ekonomi maupun lainnya.

Mengenai jadwal pelaksanaan dan hal lainnya mengenai pelatihan bagi pelaku usaha rumahan ini, lebih lanjut dijelaskan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Perberdayaan Ikan yakni:

“Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas Perikanan bagi pelaku usaha rumah tangga sudah direncanakan awal tahun dan biasanya terlaksana setiap sekali dalam tiga bulan dan setiap usaha rumahan yang terdaftar memiliki perwakilannya masing-masing dalam mengikuti pelatihan” (Hasil wawancara AM, 01 Ferbruari 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelatihan bagi pelaku usaha rumah tangga telah terencanakan pada awal tahun dan setiap penyelenggaraannya terdapat perwakilan dari masing-masing kelompok usaha. Berdasarkan hasil wawancara penulis terkait hal diatas salah satu dari kelompok pelaku usaha rumah tangga mengatakan:

“Pelatihan sering ada dan itu dilakukan beberapa kali dalam setahun, pelatihan mengenai melatih kemampuan untuk memproduksi ataupun penyampain informasi yang berhubungan dengan usaha kami. Jadi bila ada pelatihan kami menunjuk anggota kelompok yang bisa hadir bila saya sebagai ketua berhalangan untuk hadir” (Hasil wawancara MN 27 Februari 2018).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha mengikuti pelatihan dengan ada perwakilan setiap kelompok, dikatakan bahwa pelatihan ada yang bertujuan untuk menambah skill dalam berproduksi dan dirangkaikan dengan penyampain informasi yang terkait dengan usaha rumahan. Dalam hal ini lebih lanjut dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kasi Pendidikan Pelatihan Pendampingan dan Pembudidayaan Ikan, yaitu:

“Pelatihan-pelatihan yang diadakan seperti bimbingan teknis terkait manajemen, pengetahuan sampai pada hal pengembangan keterampilan yang diadakan secara continue, bertujuan supaya ada pengembangan lebih lanjut kedepannya” (Hasil wawancara TM, 09 Maret 2018)

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa pelatihan dilakukan secara continue (berlanjut) sebagai upaya dalam pengembangan kedepannya.

Hasil wawancara dari berbagai informan terkait dengan pelatihan bagi pelaku usaha rumah tangga berbasis perikanan, dapat diketahui bahwa pelatihan-pelatihan sering diadakan yang sudah direncanakan awal tahun, ini sebagai upaya dalam mengembangkan usaha rumah tangga supaya lebih kompetitif dengan terciptanya tenaga-tenaga ahli. Adapun pelatihannya seperti teori, bimbingan teknis, manajemen dan meningkatkan keterampilan. Diharapkan dengan adanya hal seperti ini kedepannya lebih baik lagi

Kesimpulan penulis terkait peran pemerintah dalam hal sebagai dinamisator cukup memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha rumah tangga di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, ini dilihat dari beberapa indikator yang berhubungan dengan peran pemerintah yang dimaksud dalam hal pemberdayaan usaha rumah tangga yakni, pengembangan kemitraan bagi pelaku usaha rumah tangga, pemerintah disini yakni dinas Perikanan Pangkep membantu para pelaku usaha agar dapat bekerja sama dengan pelaku usaha-usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pemasaran seperti usaha perhotelan ataupun rumah makan. Kemudian mengenai masalah pelatihan, pelatihan yang diadakan oleh pemerintah terkait sering dilaksanakan dalam sekali dalam tiga bulan, seperti pelatihan manajemen ataupun teknis ini bertujuan untuk memberikan stimulus bagi para pelaku usaha agar lebih berkompeten.

C. Factor Pendukung Dan Penghambat Peran Pemerintah Daerah Dalam pemberdayaan Usaha Rumah Tangga di Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

1. Faktor Pendukung

a. Dukungan dari masyarakat

Yang menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan adalah orang-orang yang bertindak didalamnya, tak terkecuali dengan usaha rumahan ini. Sumber daya manusia yakni harus memberikan sumbangsi yang jelas terhadap suatu program agar tepat sasaran. Terkait dalam hal ini masyarakat sangat mendukung akan kegiatan mendirikan usaha rumahan ini, sehingga semakin bertambah pelaku usaha rumah tangga berbasis perikanan. Berikut hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan Dinas perikanan Pangkep:

“Faktor dari keberhasilan program yang ada di daerah yakni factor dari masyarakatnya, semua program akan berujung perbaikan pada perbaikan kehidupan masyarakat, jadi sangat perlu dukungan dari mereka, hal ini yang kami dapati dalam pengembangan usaha rumah tangga mereka mendukung dilihat dari antusias mereka dalam melakukan usaha rumah tangga” (Hasil wawancara AM, 01 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat antusias akan adanya pemberdayaan usaha rumah tangga, dengan bertambahnya para pelaku usaha rumahan ini. Lebih lanjut akan hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan yakni:

“Dalam kegiatan ini yang perlu di apresiasi bahwa adanya kemauan masyarakat untuk malakukan usaha, apalagi alam menyediakan bahan baku yang diperlukan dalam menjalankan usaha ini” (Hasil wawancara MT, 01 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa dukungan masyarakat terlihat bila mereka mempunyai kemauan tinggi untuk menjalankan program dan disini

berupa usaha rumah tangga yang diperhatikan pemerintah sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat berbasis daerah pesisir. Sebagai upaya penggerak perekonomian masyarakat pesisir usaha rumah tangga ini dijalankan, apalagi laut menyediakan bahan dasarnya sebagai potensi lebih baik kedepannya lagi, hingga sudah sewajarnya bila hal seperti ini dikembangkan. Berikut hasil wawancara dengan Kasi Pendidikan Pelatihan Pendampingan Pembudidayaan Ikan mengatakan:

“Antusias masyarakat cukup tinggi untuk melakukan usaha rumah tangga ini, sikap mereka ini didasarkan bahwa kemauan untuk membantu pemasukan dikeluarga mereka masing-masing dengan harapan kedepannya dapat bersaing dengan usaha-usaha lainnya” (Hasil wawancara TM, 01 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa kemauan masyarakat yang tinggi untuk melakukan usaha rumah tangga karena mereka berharap hal ini dapat menambah pendatan untuk keluarga mereka.

b. Sumber Daya Alam

Tak dapat dipungkiri bahwa negeri kita ini kaya akan berbagai sumber daya alam dari berbagai sector, salah satunya dari sumber daya yang tersedia di laut. Dari dulu sampai saat ini kekayaan laut terus saja dinikmati tapi tak habis-habis, inilah bukti bahwa sumber daya yang ada di laut sangat melimpah. Tapi hasil kekayaan laut ini harus lebih dikembangkan sehingga manfaatnya besar dan meluas dikalangan orang banyak.

Seperti halnya dengan pengelolaan ikan hasil tangkapan nelayan yang dilakukan para pelaku usaha rumah tangga yang terus berinovasi agar nilai jualnya meningkat, dalam hal ini mereka sangat terbantu untuk mendapatkan bahan baku. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha yakni:

“Usaha ini sangat terbantu karena antusias dari anggota kami, mereka sangat semangat dalam bekerja, dan yang terpenting itu bahan baku dari produksi usaha ini mudah kami dapatkan karena itu berasal dari lingkungan kami” (Hasil wawancara SW, 02 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha mudah mengakses bahan baku karena mereka tinggal di daerah pesisir yang berdekatan dengan laut tempat bahan baku yang mereka perlukan. Bahan baku bagi pelaku usaha rumahan disini tidak akan bermasalah karena alam menyediakan itu apalagi akses yang dekat, dan hubungan baik dengan para penangkap ikan yakni nelayan. Lanjut lagi sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan terkait dengan hal ini:

“Hal yang harus kita syukuri bahwa alam menyediakan kekayaan banyak tinggal kita sebagai manusia apa mau memanfaatkannya atau hanya ingin melihat-lihatinya, artinya tak memanfaatkan potensi yang ada” (Hasil wawancara MT, 02 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sumber daya alam sangat mendukung dalam menjalankan usaha rumah tangga tinggal dari kitanyalah sebagai sumber pengembangan, mau memaksimalkannya atau sebaliknya.

2. Faktor Penghambat

Usaha rumah tangga yang berbasis daerah pesisir merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada wilayah pesisir. Daerah pesisir yang kebanyakan masih terbelakang khususnya masalah pertumbuhan ekonomi bagi masyarakatnya, yakni perilaku konsumtif masih tinggi sedangkan produksinya yang masih kurang, untuk itu pemerintah perlu lebih mengupayakan agar kedepannya hal ini teratasi.

Berikut yang menjadi factor penghambat dalam produksi usaha rumah tangga di wilayah pesisir yaitu:

a. Kondisi Iklim Tidak Menentu

Iklim atau cuaca tak bisa terpisahkan dari kehidupan di bumi. Sebagai manusia kita Cuma bisa menerima dan mensyukurinya. Iklim sangat menentukan aktivitas dari manusia, tak terkecuali dengan aktivitas di laut. Nelayan tak akan pergi menangkap ikan apabila cuacanya tak mendukung, seperti hujan yang disertai dengan angin kencang sehingga lautan pun tak tenang. Bila terjadi hal seperti ini stok ikan akan kurang dan harganya pun semakin naik.

Pada waktu yang sama hal yang tak menguntungkan juga dirasakan para pelaku usaha rumah tangga yang tak akan memiliki bahan baku yang cukup dalam berproduksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha terkait hal ini sebagai berikut:

“Yang sering membuat kami berhenti dalam memproduksi amplang adalah kurangnya bahkan tak adanya bahan baku yang tersedia, Kami membuat Peyek dengan Udang dan udang ini sulit dipasaran apalagi bila cuaca yang tak bagus” (Hasil wawancara SW, 02 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas bahwa produksi usaha rumah tangga suatu waktu dapat berhenti karena tak adanya bahan baku yang beredar di sebabkan oleh iklim atau cuaca yang tak baik.

Hal disini perlu dipahami bahwa stok barang masih ada yang disediakan oleh alam tapi dalam mengambilnya yang terkendala karena kondisi cuaca yang tak bersahabat. Lanjut lagi sesuai hasil wawancara penulis dengan Pelaku Usaha sebagai berikut:

“Disini kita menggantungkan hidup pada alam, salah satu contoh usaha rumah tangga yang bahan pokok dari lautan, lautan rentan dengan iklim yang tak baik jadi ini sudah konsekuensi kehidupan yang tak bisa dihindari dan tak mungkin juga dapat dihilangkan” (Hasil wawancara MR, 02 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa iklim yang tak menentu tak dapat dihindari sudah jadi ketentuan dalam hidup. Meskipun itu kadang-kadang tak membuat kita nyaman. Hal yang sama dirasakan oleh pelaku usaha rumah tangga lainnya:

“Hambatan usaha kami terasa muncul ketika cuaca lagi tak bagus terutama di musim hujan, para nelayan tak pergi melaut, sehingga ikan yang adapun kurang, usaha kami pun dalam hal pemasaran ikan juga cukup terganggu karena persediaan ikan yang kurang” (Hasil wawancara KT, 02 Maret 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan adanya pengaruh alam dalam hal berproduksi, ketika bahan baku susah untuk dijangkau saat itulah usaha rumah tangga akan mendapatkan hambatan.

b. Pemasaran produk

Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu produk yang dijual adalah apakah produk itu laris atau hanya menjadi barang yang bertumpuk karena tak laku dipasaran, ini tergantung dari kualitas barang itu apa menarik minat pembeli dan minat tempat pemasaran.

Produk usaha rumah tangga di Pangkep terkendala masuk toko-toko yang berlabel modern karena permasalahan persyaratan izin, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kemitraan Usaha Iptek dan Informasi Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mengatakan:

“Yang masih disayangkan sampai saat ini bahwa hasil produksi usaha rumah tangga belum bisa masuk di minimarket karena masalah perizinan yang cukup beragam dari pihak minimarket sendiri” (Hasil wawancara SN, 02 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa bila mau memasukkan produk ke toko harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang berlaku, persyaratan disini harus mempunyai label halal pada kemasan. Ini juga sebagai konsekuensi bila mau masuk ke pasar-pasar yang lebih besar.

Pemasaran produk juga tergantung dengan daya beli masyarakat, bila calon pembeli berpikir bahwa harga barang tak sesuai dengan kegunaannya produk itu tak akan di beli, umumnya pembeli tak terlalu peduli mengenai nilai seni suatu barang dan pembuatannya seperti apa, jadi dibutuhkan kemampuan untuk membaca kondisi pasar agar penjualan lebih produktif, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha:

“Mengenai soal hambatan dari usaha ini, yaitu kurang diminati masyarakat setempat, karena menurut mereka terlalu mahal, padahal untuk membuatnya tidaklah mudah, dibutuhkan yang namanya ketekunan” (Hasil wawancara SW, 02 Maret 2018)

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa masyarakat sekitar tak terlalu berminat dengan produk usaha rumah tangga karena dimata mereka terlalu mahal. Jadi untuk produk seperti ini cocoknya diperuntungkan pada orang pendatang atau pada wilayah lain, karena kalau untuk ruang lingkup sekitar itu tak akan menarik karena terlalu sering dilihatnya artinya sudah tidak asing lagi.

Terkait hal ini pasar juga melihat bagian luar suatu produk, yakni kemasannya, hal ini diutarakan oleh salah satu pelaku usaha rumah tangga sesuai dengan hasil wawancara, sebagai berikut:

“Masalah yang kami dapati dalam menjalankan usaha ini yaitu kemasan dari hasil produksi kami ini masih kurang menarik bagi calon konsumen” (Hasil wawancara KT, 02 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam memasarkan sebuah produk diperlukan yang namanya daya tarik untuk menarik minat para pembeli sehingga lebih dapat bersaing di lingkungan pemasaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya yang ada di bidang Pemberdayaan Usaha kecil Pembudidayaan Ikan dalam hal ini telah menjalankan peran pemerintah dalam hal sebagai (1) Stabilator, meliputi *Penciptaan kondisi usaha yang kondusif* berupa perizinan yang tidak rumit dan tidak ada pula penarikan uang pajak bagi pelaku usaha rumah tangga . *Bantuan permodalan* berupa barang yang dibutuhkan para pelaku usaha seperti alat pendingin, kompor dan sebagainya. (2) Dinamisator, meliputi *Pengembangan kemitraan* yaitu pemerintah memfasilitasi para pelaku usaha berupa kemitraan dengan rumah makan, hotel, dan toko/swalayan guna membantu dalam hal memasarkan produk. *Pelatihan* yang diadakan pemerintah dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali, seperti pelatihan manajemen usaha, dan pelatihan teknis.
2. Faktor pendukung yaitu a). Dukungan dari masyarakat dilihat dari kemauan yang tinggi b). Sumber daya alam yang senantiasa menyiapkan bahan baku usaha. Faktor penghambat berupa a). Iklim alam yang tidak menentu dan b).Pemasaran produk yang belum maksimal.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu menyiapkan regulasi yang mengatur iklim usaha yang lebih profesional dan mandiri.

2. Untuk pengembangan Industri Rumah Tangga, sebaiknya memperhatikan aspek-aspek pada; Akses Permodalan, Manajemen Usaha, Dukungan Pemasaran, Kestinambungan Pembinaan dan Pendampingan.
3. Pemerintah daerah perlu rencana aksi yang nyata, terpadu dan berkelanjutan dalam penanganan secara serius industri rumah tangga yang telah ada, berupa bantuan modal, bantuan pelatihan teknis, dan bantuan teknologi.
4. Pemeritah daerah perlu menciptakan unit-unit usaha baru yang sesuai dengan sumberdaya daerah yang berdasar pada kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Syamsul. 2012. *Peranan Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Kebudayaan Tanah Adat Karangpuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai*. Unismuh Makassar.
- Arif., 2012. *Peran dan Fungsi Pemerintah*, Diakses pada 10 februari 2015. (<http://www.arifgi.blogspot.com/peran-dan-fungsi-pemerintah.htm>).
- BPS, 2013. Kabupaten Pangkep
- Dahuri, R, J. Rais, S. P Ginting, dan M.J Sitepui., 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dipta, I. Wayan., 2004. *Membangun Jaringan Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta.
- Jimmy, Ibrahim. 1991. *Prospek Otonomi Daerah*. Semarang : Dahara Prize.
- Kusnadi, 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Bandung: Humaniora.
- Mardikanto, T, Soebiato, P., 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi S, 2005. *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nikijuluw, Victor P.H, 2002. *Politik Ekonomi Perikanan. Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan?*, Jakarta: PT. Feraco.
- Pangabea, Riana., 2004. *Membangun Paradigma Baru Dalam Mengembangkan UKM*, Jakarta.
- Rewansayah, Asmawi., 2011. *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Public*, Jakarta: STIA-LAN.
- Sallatang, M. Arifin., 2000. *Pembangunan, Partisipasi dan Kelembagaan Sosial di Sulawesi Selatan*, Universitas Hasanuddin.
- Sastrawidjaja, dkk., 2002. *Nelayan Nusantara, Pusat Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Jakarta.
- Satria, Arif., 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Satria, Arif., 2009. *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*, Bogor: IPB Press.
- Soekanto, S . 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulistiyani, Ambar, Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah, Pustaka Pergaulan, Jakarta.

Widjaja, A.W. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

L

A

M

P

I

R

A

N



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 1640/A.3-II/XII/1439/2017

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Tamrin

St a m b u k : 10564 01406 11

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Rumah Tangga di Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan"

Pembimbing I : Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM

Pembimbing II : Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar

Pada Tanggal : 05 Desember 2017



Dekan,
Hyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM : 7307 27.

Tembusan Kepada Yth:

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

Nomor : 0245/FSP/A.1-VIII/II/1439 H/2018 M
 Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
 Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
 Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
 Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
 Di -
 Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Tamrin
 S t a m b u k : 105640140611
 J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
 Lokasi Penelitian : Kelompok Usaha Rumah Tangga dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 Judul Skripsi : ***"Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Rumah Tangga di Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
 Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 12 Februari 2018



Dekan,
 Ub. Pembantu Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
 NBM. 1084 366



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2663/Izn-~~S~~/C.4-VIII/II/37/2018
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : *Permohonan Izin Penelitian*
 Kepada Yth,
 Bapak / Ibu Bupati Pangkep
 Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
 di -

26 Jumadil awal 1439 H
 12 February 2018 M

Pangkep

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0245/I/SP/A.1-VIII/II/1439II/2018M tanggal 12 Februari 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : TAMRIN
 No. Stambuk : 10564 01406 11
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

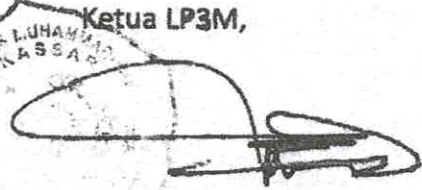
"Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Rumah Tangga di Wilayah Pesisir Kabupaten Pankajene dan Kepulauan"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Februari 2018 s/d 17 April 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumulahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sultan Hasanuddin (0410) 21200 Ext 146 Pangkajene

Pangkajene, 14 Februari 2018

Kepada,

Yth. Kadis Perikanan Kab. Pangkep
Di-

Nomor : 070/0 58 /II/ KKBP /2018
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Pangkajene

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 2663/Izn-5/C.4-VIII/II/37/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Perihal Izin Penelitian, maka disampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : TAMRIN
No. Satambuk : 10564 01406 11
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (SI)

Bermaksud akan melakukan Penelitian di daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan Skrripsi dengan judul :

"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA RUMAH TANGGA DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN"

Penelitian dilaksanakan selama 2 (Dua) Bulan tanggal: 17 Februari s/d 17 April 2018

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) exemplar copy hasil "PENELITIAN" kepada Bupati Pangkep Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Balitbangda.
5. Surat ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan selanjutnya,-



Drs. H. E. A. M. HASRI, M.Si
Pembina Tk. I

19601110 198101 1 005

TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Bupati Pangkep di Pangkajene;
2. Kepala Balitbangda Kab. Pangkep di Pangkajene;
3. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
Sdr(i) TAMRIN;

----- *Pertinggal* -----



Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin KM. 7 Telp. 0411-86697. Makassar 90221

Bapak/ibu yang saya hormati,

Saya atas nama Tamrin mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam hal ini saya sedang mengadakan penelitian tugas akhir yang berhubungan dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Rumah Tangga di Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dimana penelitian ini hanya untuk kepentingan penelitian semata dalam menyusun Skripsi.

Atas bantuan, ketersediaan waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Hari/Tgl :

Lokasi :

A. Identitas Informan :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Jabatan/Pekerjaan :

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Rumah Tangga di Wilayah Pesisir kota Parepare

Pertanyaan Wawancara:

1. Langkah-langkah apa yang digunakan dalam upaya menciptakan kondisi usaha yang kondusif untuk usaha rumah tangga?

Jawaban :

.....
.....

2. Dalam pelaksanaan usaha rumah tangga ini bantuan permodalannya bagaimana?

Jawaban :

.....
.....

3. Seperti apa peran pemerintah dalam usaha pengembangan kemitraan bagi usaha rumah tangga?

Jawaban :

.....
.....

4. Bentuk pelatihan seperti apa yang dilakukan pemerintah dalam usaha pemberdayaan usaha rumah tangga?

Jawaban :

.....
.....

C. Factor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemberdayaan Usaha Rumah Tangga di Wilayah Pesisir kota Parepare

Pertanyaan Wawancara:

1. Hal-hal yang menjadi factor pendukung?

Jawaban :

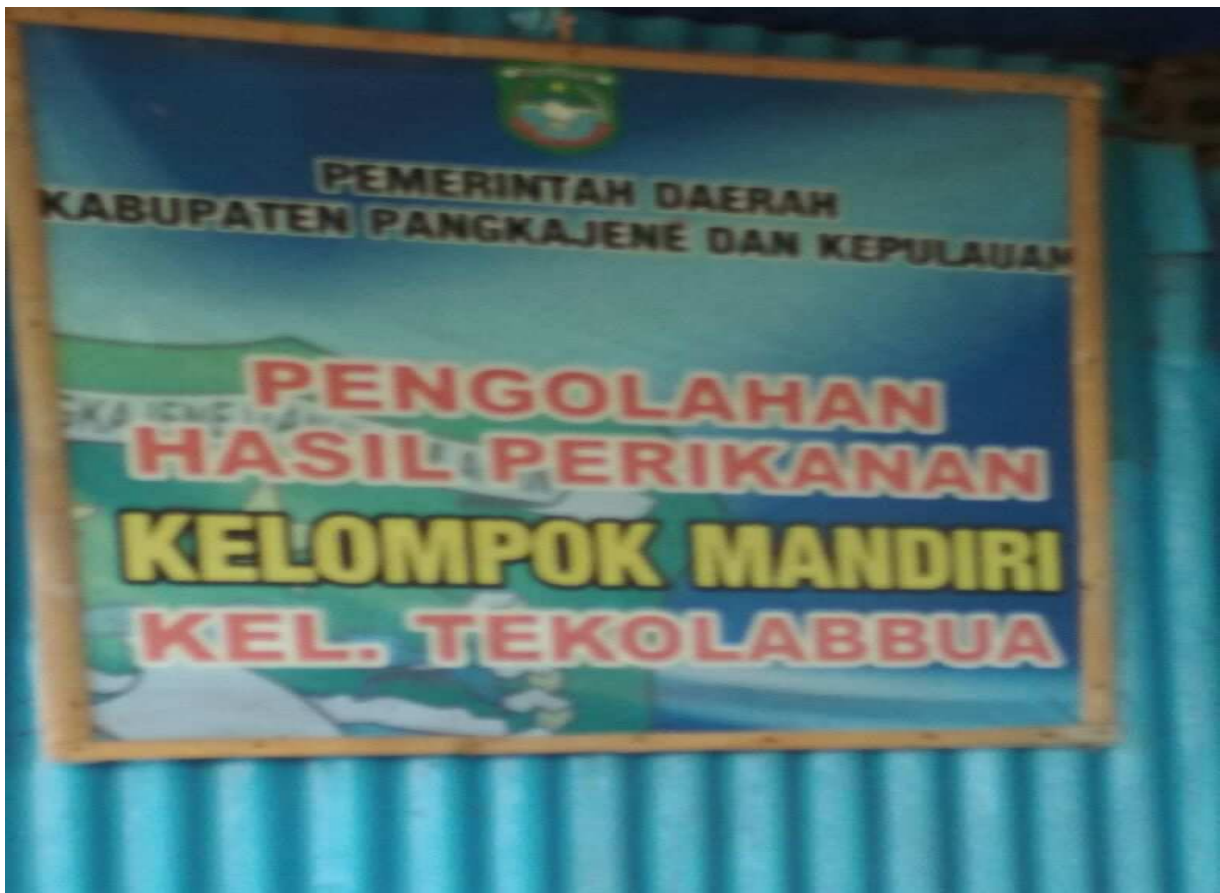
.....
.....

2. Hal-hal yang menjadi factor penghambat?

Jawaban :

.....
.....

DOKUMENTASI PENELITIAN



RIWAYAT HIDUP



Tamrin, Lahir pada tanggal 10 Mei 1992 di Pulau Sapuka Kecamatan Liukan Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak ke 3 dari 9 bersaudara buah cinta dari Sahide dan Rabaiah.

Penulis memulai pendidikan dasar di SDN 28 Sapuka kecamatan Liukan Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan provinsi Sulawesi Selatan Pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2005. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Lukang Tangaya Kabupaten Pankajene dan Kepulauan dan tamat pada tahun 2008 kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA 1 Liukan Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan tamat pada tahun 2011 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat perjuangan dan kerja keras yang di sertai doa dari kedua orang tua dan saudara, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar berhasil dengan tersusunnya skripsi yang berjudul:

“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Rumah Tangga di Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkajane dan Kepulauan”